

**Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketidakpatuhan Wajib
Pajak UMKM Bidang Konveksi di Kabupaten Tegal**



Oleh:

Nama: UMI MAHFIYAH

No. Mahasiswa: 16312239

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2020**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BIDANG KONVEKSI DI
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai

derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada

Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Umi Mahfiyah

No. Mahasiswa : 16312239

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku. "



Yogyakarta, 10 Agustus 2020



Penulis

(Umi Mahfiyah)

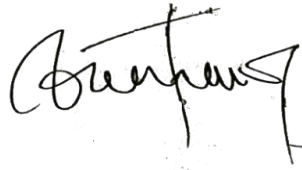
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BIDANG KONVEKSI DI
KABUPATEN TEGAL**

Halaman Pengesahan

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
Nama: Umi Mahfiyah
No. Mahasiswa : 16312239

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 5 Agustus 2020
Dosen Pembimbing,



Sigit Handoyo.,S.E.,M.Bus.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETIDAKPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM BIDANG KONVEKSI DI KABUPATEN TEGAL**

Disusun Oleh : **UMI MAHFIYAH**

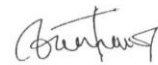
Nomor Mahasiswa : **16312239**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Senin, 07 September 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Sigit Handoyo, S.E., M.Bus.**

Penguji : **Arief Rahman, S.E., SIP., M.Com., Ph.D.**



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat, hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil'alamin.

Penelitian penulis yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi di Kabupaten Tegal” disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya terdapat banyak hambatan, namun tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingi menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan, serta selalu mengabulkan setiap doa hamba-Nya dalam menjalani keseharian sebagai seorang muslim. Penulis sangat bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan.
2. Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah yang selalu merindukan umatNya. Semoga ketauladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri.

3. Ayahanda tercinta Bapak Suwanto dan Ibunda tercinta Latifah selaku orang tua penulis yang sudah memberikan semangat, dukungan, motivasi, nasihat dan doa yang tidak pernah putus disetiap sujudnya. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang sangat baik untuk penulis dan selalu mendukung apapun yang ingin penulis lakukan. Hanya doa terbaik dari seorang anak yang dapat penulis berikan kepada bapak dan mama serta semoga bapak dan mama selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Amin
4. Bapak Sigit Handoyo.,S.E.,M.Bus, Selaku dosen pembimbing penulis. Karena tanpa beliau penulis tidak bisa berbuat banyak tentang penelitian ini. Terimakasih atas telah memberikan ilmu dan masukan selama proses penyusunan skripsi. Semoga Pak Sigit Handoyo selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin
5. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua program Studi Akuntansi FBE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
8. Untuk keluarga penulis terimakasih sudah selalu mendukung dan menyayangi adiknya sampai saat ini. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin
9. Muhammad Fajar Ramadhan, terimakasih sudah menjadi sahabat penulis dari jaman maba, yang selalu mendengar keluh kesah penulis selama 4 tahun, selalu

membantu penulis ketika penulis sedang membutuhkan pertolongan, selalu memberikan masukan, motivasi, kebahagiaan selama ini. Dan selalu ada disaat senang maupun sedih, i love u dek. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan dilancarkan segala urusannya.

10. Febriani Indah, penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih sudah mau menemani penulis dari awal pendaftaran di UII sampai sekarang, dan sudah mendengarkan keluh kesah, perjuangan penulis di masa-masa perkuliahan penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan sukses selalu.
11. Melinda Faulani dan Jihan Chairani, terimakasih banyak sudah menjadi sahabat penulis dibangku perkuliahan ini. Terimakasih selalu ada disaat senang maupun sedih, walaupun selalu bully satu sama lain tapi penulis tetep sayang. Semoga kita diberikan kesuksesan untuk kedepannya. Amin
12. Untuk teman-teman kuliah penulis, Bella, Novika, Sasha, Emek, Fitria, Syawal, Ilham, Reza, Elys, Salma Ulfah, Terimakasih sudah menjadi teman belajar penulis semasa kuliah.
13. Untuk teman-teman penulis Yulia, Tami, Lulu, Nana, Ghina, Ririn yang sudah mendukung, menyemangati, dan selalu menemani penulis ketika sedang mengerjakan penelitian ini.
14. Keluarga KKN unit 20 pucanganom Shidiq, Tina, Getty. Terimakasih telah menjadi teman hidup selama satu bulan, dan memberikan banyak pelajaran hidup. Terutama Bimo dan Sani, terimakasih banyak atas waktunya yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, dan selalu bersedia meluangkan waktunya ketika penulis sedang membutuhkan bantuan. Semoga sukses selalu.
15. Muhammad Hazmi, terimakasih atas dukungannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semangat.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya. Dalam hal ini, peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualikum Wr.Wb



Penulis,

(Umi Mahfiyah)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA UJIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Manfaat Penelitian	22
1.5 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1 Landasan Teori.....	26
2.1.1 Theory Of Planned Behavior	26
2.1.2 Teori Atribusi.....	28
2.1.3 Sikap terhadap Perilaku	29
2.1.4 Norma Subyektif	29
2.1.5 Kontrol Perilaku	30
2.1.6 Pajak.....	31
2.1.7 Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	32
2.1.8 Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Pajak.....	33
2.1.9 Sanksi Pajak	35
2.2 Telaah (<i>Review</i>) Penelitian Terdahulu	36
2.3 Hipotesis Penelitian.....	45
2.3.1 Pengaruh Sikap Keperilakuan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	45
2.3.2 Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	46
2.3.3 Pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	47
2.3.4 Pengaruh Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	48
2.3.5 Pengaruh sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan.....	49

2.4 Kerangka Penelitian	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Populasi.....	53
3.2 Sampel.....	53
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	54
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	55
3.4.1 Variabel Dependen.....	56
3.4.2 Variabel Independen	56
3.5 Metode Analisis	63
3.5.1 Uji Validitas	63
3.5.2 Uji Reliabilitas	63
3.5.3 Uji Klasik	63
3.5.4 Regresi Linear Berganda.....	65
3.5.5 Uji Model	65
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	67
4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	67
4.2 Karakteristik Responden	67
4.3 Analisis Data	69
4.3.1 Uji Validitas	69
4.3.2 Uji Reliabilitas	71
4.4 Uji AsumsiKlasik.....	73
4.4.1 Uji Normalitas.....	73
Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram	74
4.4.2 Uji Multikolineritas.....	76
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	78
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	79
4.5 Uji Regresi Berganda	79
4.5.1 Koefisien Determinasi.....	82
4.5.2 Uji Statistik F	82
4.5.3 Uji Statistik T	84
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian	87
4.7.1 Pengaruh Sikap Keperilakuan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	87
4.7.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	88
4.7.3 Pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak.....	89
4.7.4 Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap.....	90

4.7.5 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	93
5.3 Saran.....	93
5.4 Implikasi Hasil Penelitian	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Variabel Independen	59
Tabel 4.1 Profil Wajib Pajak	68
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas	70
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas	72
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas dengan Analisis Statistik Non Parametrik	76
Tabel 4.8 Uji Multikolineritas	77
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Berganda.....	80
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisiwen Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	82
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Theory of Planned Behaviour.....	28
Gambar 2.4 Kerangka Penelitian	51
Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram	74
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	79

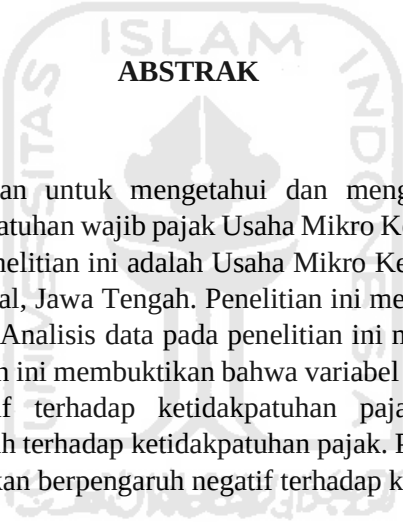
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisioner Penelitian	104
Lampiran 2: Data Hasil Kuisioner	109
Lampiran 3 : Profil Wajib Pajak	118
Lampiran 4 : Uji Reliabilitas dan Uji Validitas	119
Lampiran 5 : Uji Asumsi Klasik	125
Lampiran 7 : Uji Hipotesis	128

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors that influence the noncompliance of tax payers for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Tegal Regency. The object of this research is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Tegal Regency, Central Java. This study uses primary data obtained from 100 respondents. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis. The results of this study prove that behavioral variables and subjective norms have a positive effect on tax noncompliance. Perceived behavioral control has no effect on tax non-compliance. Understanding and knowledge of taxation and taxation sanctions negatively affect tax noncompliance.

Keywords: Principality, Subjective Norms, Behavioral Control, Understanding and Knowledge of Taxation, Tax Sanctions, Tax Non-compliance.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tegal. Objek penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 100 responden. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel sikap keprilakuan dan norma subyektif berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak. Pemahaman dan pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan pajak.

Kata Kunci : Sikap Keprialakuan, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku, Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Ketidakpatuhan Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu pemerintahan, pendapatan negara merupakan hal yang penting karena pendapatan mempunyai fungsi untuk keberlangsungan pembangunan serta pembiayaan segala kegiatan operasional pemerintahan salah satunya gaji pegawai di pemerintahan dan berbagai macam subsidi diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, ketanagakerjaan, perumahan rakyat, dan pengeluaran pembangunan lainnya. Waluyo (2011) berpendapat bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara untuk membiayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama. Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dimana banyak melakukan pembangunan di segala bidang, sehingga membutuhkan dana yang cukup besar untuk menanggung kepentingan pembangunannya.

Pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, karena pajak merupakan sumber penerimaan paling tinggi di negara. Kenaikan pendapatan harus diimbangi dengan pencapaian pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dalam perpajakan. Salah satu yang diperlukan dalam hal tersebut dengan adanya peran masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga semua kebutuhan pembangunan bisa dibiayai. Saat ini pemerintah berupaya memperbarui sistem perpajakan yang lebih sebanding, juga dalam rangka penerimaan pajak jangka pendek maupun jangka panjang pemerintah memperluas data yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi (Marjan, 2014). Setelah reformasi perpajakan dalam meningkatkan perolehan dalam negeri dari sektor pajak yang melalui peralihan

sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* digantikan oleh *self assessment system* pada tahun 1983.

Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self assessment* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung pajak yang terutang, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan. *Self Assesment System* menuntut masyarakat agar lebih sadar dan berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dengan adanya system seperti ini akan menjadi patuh dalam pembayaran pajak.

Peningkatan pendapatan Negara di sektor perpajakan yang ditargetkan tiap tahunnya naik perlu diimbangi dengan adanya usaha yang lebih baik lagi (Nainggolan dan Patimah, 2019). Banyak peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan harapan masyarakat lebih sadar untuk berpartisipasi dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat menekan untuk kebutuhan negara diatur oleh undang-undang. Banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara, sehingga pajak merupakan keadaan yang paling penting untuk dijadikan perhatian. Direktorat pajak dan petugas pajak dalam melakukan pemungutan pajak harus berperan aktif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat

pajak kepada Wajib Pajak. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri dan terdapat hubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pendorong Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, pada faktor eksternal berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi, kondisi, dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013). Moralitas yang berasal dari wajib pajak juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena membayar pajak merupakan keadaan sikap dari wajib pajak itu sendiri. Ada dua hal yang menyangkut aspek moral pada bidang perpajakan yaitu kewajiban moral yang berasal dari wajib pajak itu sendiri untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan kesadaran moral wajib pajak atas distribusi penerimaan pajak dari pemerintah (Brown, 2003).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha informal yang memiliki peran penting dan telah mendominasi perekonomian di Indonesia (Syahputri, 2015). Kontribusi mereka adalah meningkatkan nilai perekonomian di Indonesia, yang tiap tahunnya selalu berkembang adalah usaha ekonomi produktif yang mendirikan usahanya sendiri atau badan usaha yang bukan anak dari perusahaan atau yang mempunyai cabang perusahaan sendiri maupun usaha besar yang telah memenuhi kriteria usaha kecil (Nainggolan dan Patimah, 2019). Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh bisa menjadikan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah nilai pendapatan negara.

Menurut Fuadi dan Mangoting (2013) permasalahan terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat penting. Karena apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan dapat menyebabkan keinginan dalam melakukan pengelakan, pelalaian dan penghindaran pajak yang akhirnya akan merugikan negara.

Di Kabupaten Tegal Kecamatan Adiwerna terdapat sentra industri konveksi yang tersebar di tempat desa yaitu Tembok Banjaran, Tembok Lor, Tembok Kidul dan Tembok Luwung. Empat desa tersebut merupakan sentra industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) konveksi yang sangat berkembang pesat di Kabupaten Tegal. UMKM konveksi yang meliputi usaha pakaian jadi, bordir, atau kebutuhan sandang lainnya. UMKM konveksi memiliki pendapatan Rp. 807.409.000,00, berkontribusi menyumbang PDRB kabupaten Tegal sebesar 3,16% pada tahun 2017. Di Kab. Tegal masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) konveksi yang tidak mau membayar pajak. Bisa dilihat dari rendahnya jumlah pemilik UMKM konveksi yang belum mendaftarkan usahanya dalam memiliki NPWP, juga kurangnya pengetahuan tentang pembayaran pajak usaha. Dengan hal ini memberikan suatu informasi bahwa tingginya perkembangan UMKM konveksi di Kabupaten Tegal belum mampu meningkatkan penerimaan pajak negara.

Besaran tarif wajib pajak usaha mikro diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, tarif Pph finalnya sebesar 1%. Pemerintah pada tahun 2018 melakukan revisi terhadap PP ini agar usaha mikro dapat berkembang yang masih berlaku sampai saat ini dan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu diatur dalam PP nomor 23 Tahun 2018. PP pengganti Nomor 46 Tahun 2013 ini telah efektif

berlaku sejak 1 Juli 2018. Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 besaran PPh Final diturunkan menjadi 0,5%. Direktorat Jendral Pajak (DJP) akan mensosialisasikan penurunan PPh Final untuk usaha mikro dan dampaknya cukup signifikan terhadap dunia perpajakan Indonesia. Pasalnya, dengan penurunan tarif PPh Final, wajib pajak dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) semakin meningkat.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak salah satunya dilakukan oleh Syahputri (2015) yang meneliti Analisis Faktorfaktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak studi empiris pada pengusaha UMKM di KKP Pratama Pekanbaru Senapelan yang menguji tujuh variabel yaitu norma subyektif, sikap, kontrol perilaku tidak patuh, kewajiban moral, pengetahuan perpajakan, dan niat. Hasil penelitiannya bahwa variabel sikap, kewajiban moral, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. Variabel norma subyektif, kontrol perilaku terhadap niat berperilaku tidak patuh tidak diterima atau ditolak. Secara garis besar bahwa perilaku kepatuhan didasarkan pada niat wajib pajak itu sendiri. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan menjadi salah satu faktor penting bagi wajib pajak untuk mengetahui soal perpajakan agar dapat berperilaku patuh. Penelitian yang dilakukan oleh Retyowati (2016) menyatakan bahwa variabel persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, norma sosial, norma moral, norma subyektif, risiko deteksi, besarnya sanksi, reilgiusitas dan niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Zaini (2010) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus pada KPP Pratama Kebayoran Lama. Hasil penelitian menunjukan; faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib

pajak orang pribadi adalah norma, sikap, kontrol perilaku, kewajiban moral, subyektif, dan niat. Variabel etika bukan faktor pembentuk ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arniati (2009) meneliti tentang peran *Theory of Planned Behavior* dan etika terhadap ketaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan perilaku dan variabel norma subyektif dari dimensi niat untuk patuh dapat mempengaruhi niat kepatuhan pajak. Faktor yang tidak mempengaruhi kepatuhan melalui variabel niat adalah norma subyektif, kontrol perilaku, faktor sikap, dan etika. Pada pengujian analisis *path* untuk menguji hubungan yang tidak langsung melalui niat terhadap kepatuhan ketika ada kemungkinan diperiksa, tidak membuktikan adanya kontrol perilaku, norma subyektif, faktor sikap, dan etika berpengaruh terhadap kepatuhan melalui variabel niat.

Faktor lain yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak adalah tingkat perilaku yang didasarkan oleh niat wajib pajak untuk tidak patuh dan kurang mengertinya wajib pajak akan pentingnya peran pajak dalam membangun negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian selanjutnya akan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu pengkajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal. Penelitian selanjutnya akan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak diantaranya; sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol perilaku, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti mengambil

judul penelitian ***“Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal”***.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor sikap berperilaku berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal?
2. Apakah faktor norma subyektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM bidang konveksi di Kab. Tegal?
3. Apakah faktor kontrol perilaku berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM bidang konveksi di Kab. Tegal?
4. Apakah faktor pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Wajib Pajak UMKM bidang konveksi di Kab. Tegal?
5. Apakah faktor sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Wajib Pajak UMKM bidang konveksi di Kab. Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai

1. Pengaruh sikap berperilaku terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal.
2. Pengaruh norma subyektif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di kab. Tegal.
3. Pengaruh kontrol perilaku terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di kab. Tegal.
4. Pengaruh pemahaman dan pengetahuam peraturan perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di kab. Tegal.

5. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di kab. Tegal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai variabelvariabel yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM bidang koveksi di kab. Tegal untuk membayar pajak seperti dalam hal kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan perpajakan dan sanksi perpajakan.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar mendaftarkan usahanya di Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) agar dapat meningkatkan pemasukan negara.

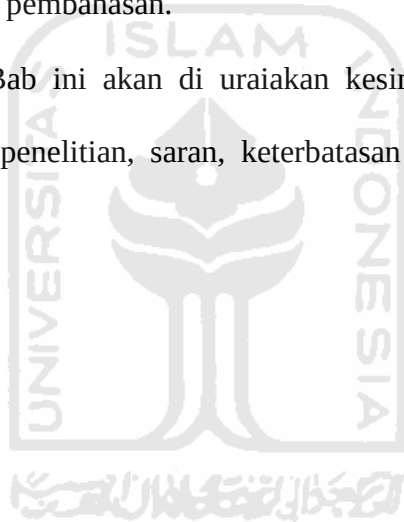
4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan litelatur bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak wajib pajak UMKM bidang konveksi di kab. Tegal.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan. Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Sistematika Penulisan.
2. Bab II - Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teori, *review* (telaah) penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.
3. Bab III - Metode Penelitian. Pada bab ini, diuraikan mengenai bagaimana variabel penelitian serta definisi operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis.
4. Bab IV – Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang deskripsi yang dihasilkan dalam penelitian serta pembahasan.
5. Bab V – Penutup. Bab ini akan di uraiakan kesimpulan dan analisa yang dilakukan dari hasil penelitian, saran, keterbatasan penelitian dan implikasi penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior

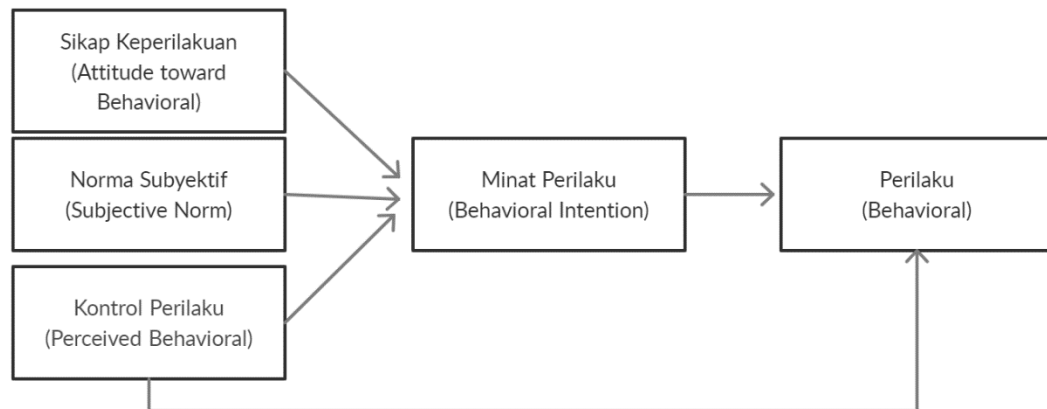
Ada beberapa teori perilaku yang telah digunakan untuk meramalkan tentang kontribusi, keikutsertaan, keterlibatan, pencapaian, kewarganegaraan, organisasional, inovasi, dan konsep perilaku individu yang lain. Teori yang digunakan dalam meramalkan perilaku dalam model psikologi adalah *Theory of Planned Behavior* (TBP), selain untuk meramalkan teori ini juga akan menjelaskan tingkah laku manusia secara spesifik. Teori ini memprediksi perilaku yang baik dengan menyeimbangkan niat dalam melaksanakan perilaku.

Theory of Reasoned Action. *Reasoned action theory* ditingkatkan menjadi *Theory of Planned Behavior* (TBP) dan secara ilmiah ada dua alasan terkait niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu, yaitu sikap terhadap perilaku dan norma subjektif (Fishbein dan Ajzen, 1975). Pada tahun 1988 ditambahkan satu faktor oleh Ajzen yaitu faktor kontrol perilaku persepsi individu atau *perceived behavioral control*, sehingga mengubah *Theory of Reasoned Action* menjadi *Theory of Planned Behavior*.

Theory of Planned Behavior (TBP) ini dalam memperkirakan suatu perbuatan bisa dilihat dari sikap terhadap perilakunya dan dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku harus mempertimbangkan sikap dan persepsi orang tersebut. Niat seseorang dalam berperilaku akan semakin tinggi jika ada sikap positif dan dukungan dari orang sekitar sehingga merasa mudah dan tidak ada hambatan (Ajzen, 2005). *Theory of Planned Behavior* (TBP) menjelaskan bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh norma subjektif, variabel sikap,

dan pengendalian berperilaku yang dipersepsikan. Norma sosial merupakan salah satu dari tiga faktor yang mempunyai dampak terhadap perilaku wajib pajak, karena adanya pengaruh dan tekanan sosial dari orang disekitar wajib pajak yang dianggap penting. Niat untuk berperilaku ini lah yang mendorong individu dalam berperilaku dan perilaku wajib pajak ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitar wajib pajak yang dianggap berpengaruh dan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, sehingga wajib pajak akan patuh membayar pajaknya. Hal ini terjadi sebaliknya, wajib pajak akan menghindari pajak ketika disekitarnya mempunyai sikap yang buruk dan menganggap membayar pajak itu tidak penting.

Niat seseorang dalam berperilaku ditentukan oleh 3 faktor yaitu; (1) *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasilnya, menghasilkan sikap dan perilaku positif atau kontrol (2) *normative beliefs*, yaitu keyakinan terkait harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, menghasilkan tekanan control yang dipersepsikan (3) *control beliefs*, yaitu keyakinan tentang adanya hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditunjukkan dan persepsi seberapa kuat hal tersebut dapat mendukung dan menghambat perilaku, menghasilkan control berperilaku yang dipersepsikan. Hambatan yang ada bisa disebabkan dari dalam diri sendiri maupun dari luar.

Gambar 2.1 Theori Of Planned Behaviour

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang dalam mengintrepretasikan suatu peristiwa, perilaku atau alasan yang mereka lakukan. Perilaku seseorang menurut Ikhsan dan Ishak (2005) disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang faktor internal yang berasal dari luar. Pada teori ini terdapat dua variable tempat pengendalian yaitu internal dan eksternal. Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami seseorang bahwa ia mampu secara personal sehingga dapat mempengaruhi kinerja serta perilakunya melalui kemampuan, usaha dan keahliannya. Sementara tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami oleh seseroang bahwa semua perilakunya dipengaruhi oleh faktor luar. Teori ini menjelaskan proses yang terjadi dan faktor yang mempengaruhi dalam diri sendiri sehingga bisa memahami tingkah laku kita dan orang lain, sehingga dengan adanya system pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen.

Perilaku seseorang dalam melakukan tindakan atau mengambil keputusan dipengaruhi oleh kekuatan internal berupa kemampuan dan kekuatan eksternal berupa

lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan teori atribusi, sehingga semakin tinggi wajib pajak dalam memahami dan mengetahui peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan (faktor internal dan eksternal) akan semakin rendah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

2.1.3 Sikap terhadap Perilaku

Menanggapi suatu hal yang disenangi atau tidak disenangi pada suatu orang, objek, peristiwa atau institusi merupakan sikap terhadap perilaku yang dimiliki semua individu (Ajzen, 1991). Variabel pertama yang dapat mempengaruhi niat berperilaku adalah sikap terhadap perilaku. Seorang individu ketika menghargai perbuatan secara positif, ia akan memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu.

Keyakinan (*behavioral beliefs*) dapat mempengaruhi pandangan tentang suatu perilaku karena tingkah laku yang dilakukan, hal ini meliputi *outcome evaluation* dan *beliefs strength*. Pandangan atas perilaku yang diyakini mempunyai dampak langsung terhadap kehendak untuk berperilaku yang kemudian diafiliasikan dengan kontrol perilaku persiapan dan norma subjektif (Ajzen, 1991). Hubungan sikap dengan ketidakpatuhan wajib pajak bisa dilihat dari sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan sistem administrasi pajak.

2.1.4 Norma Subyektif

Norma subyektif merupakan pengakuan desakan sosial dalam memperlihatkan suatu perilaku khusus (Kreitner dan Kinici, 2001). Norma subyektif adalah kepercayaan terhadap pemahaman seseorang atau kelompok yang mempengaruhi individu pada suatu perilaku. Perilaku seseorang dipengaruhi dari kehidupan sosial

mereka mulai dari keluarga, kerabat, pasangan hidup, rekan kerja dan hal lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku (Ajzen, 2006).

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) yang menjadi bagian dari norma subyektif itu kekuatan sosial yang berupa *reward* dan *punishment*, disampaikan oleh individu terhadap individu lainnya, rasanya senang individu terhadap individu tersebut, keinginan individu dan seberapa besar dianggap sebagai seorang yang berpengalaman. Tekanan sosial akan semakin besar ketika individu menyarankan untuk melaksanakan perilaku, sebaliknya tekanan sosial akan berkurang jika tidak memberikan sugesti untuk tidak melakukan sesuatu. Norma subyektif merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh (Bidin dan Shamsudhin, 2003 dalam Wanarta dan Mangoting 2014). Niat dan perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak dipengaruhi dari orang-orang-orang sekitar yang dianggap penting dan paling berpengaruh seperti keluarga, rekan kerja, konsultan pajak, teman, dan lain-lain.

Orang-orang disekitar wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak ketika orang-orang disekitarnya mempunyai sikap yang positif terhadap kepatuhan pajak, begitupun sebaliknya.

2.1.5 Kontrol Perilaku

Ukuran kepercayaan seseorang terhadap seberapa sederhananya atau kompleksnya dalam melakukan suatu perbuatan disebut dengan kontrol perilaku persepsian menurut Vaughan dan Hogg (2005). Menurut (Ajzen, 2005) mendefinisikan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan itu sebagai kesanggupan seseorang untuk menunjukkan tingkah laku yang diinginkan. Sikap dan norma subjektif

yang dimiliki seseorang dapat membantu dalam melakukan perbuatan tertentu dan bergantung pada dukungan kontrol perilaku persepsian yang dimilikinya.

Kontrol keperilakuan juga dianggap sebagai fungsi dan keyakinan (*belief*), yaitu keyakinan individu akan ada atau tidaknya faktor yang mendukung atau menghalangi akan munculnya tingkah laku (*control belief*). Pengalaman di masa lalu yang berhubungan dengan tingkah laku memunculkan keyakinan ini, sehingga bisa terpengaruhi oleh informasi tidak langsung dari tingkah laku yang diperoleh dari hasil observasi pengalaman orang lain. Pengendalian atas kontrol perilaku akan menjadi peran yang penting ketika adanya faktor pendukung, jika faktor pendukung sedikit individu akan kesulitan memahami perilaku yang dilakukannya (Ajzen, 2005). Hambatan menjadikan orang yang memiliki sikap positif dan dukungan dari orang-orang sekitar akan memiliki sedikit niatan dalam melakukan perilaku.

2.1.6 Pajak

Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pihak yang berwenang berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam kesejahteraan umum, menurut Prof. Soeparman Soemihamihaya yang dikutip dari buku Waluyo. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam (Supramono & Damayanti, 2005), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, “ pajak merupakan partisipasi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “

Waluyo (2005) mengatakan ciri-ciri yang erat kaitannya dengan pengertian pajak, adalah:

1. Berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya pemungutan pajak bersifat memaksa.
2. Pada kontraprestasi individual oleh pemerintah tidak dapat ditunjukan adanya pembayaran pajak.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Selain mempunyai tujuan *budgeter*, pajak juga mempunyai tujuan lain yaitu mengatur.

2.1.7 Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, jika sebaliknya disebut dengan ketidakpatuhan pajak. Menurut Organization for Economics and Cooperation Development-OECD (2004) dalam Santoso (2008) ketidakpatuhan pajak merupakan sebuah resiko yang dihadapi oleh administrasi pajak karena pajak tidak bisa ditarik dari wajib pajak dengan alasan wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dengan perpajakan dan menjadikan pajak terutang tidak dibayar. Agenda penting dari berbagai negara adalah meningkatkan upaya untuk kepatuhan pajak dengan adanya isu kepatuhan pajak dan ketidakpatuhan pajak. Adanya upaya penghindaran pajak yang disebabkan oleh

ketidakpatuhan pajak menjadikan isu kepatuhan salah satu dari hal penting. Menurut Hutagol (2007). Ada tiga tipe upaya penghindaran diri dari pembayaran pajak yaitu; satu, *Tax Avoidance* menghindari pajak secara legal atau tidak menyalahi peraturan dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui kelemahan peraturan (*loopholes*). Dua, *Tax Evasion* yaitu dimana wajib pajak sengaja tidak melaporkan kekayaan dan penghasilan yang harus kena pajak, tipe ini bersifat ilegal. Tiga, *Tax Arreage* yaitu wajib pajak tidak mampu membayar pajak sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak.

Tax avoidance, *tax evasion* dan *tax arreage* menyebabkan berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara. Ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi akan diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan administrasi perpajakan jika system suatu perpajakan suatu negara sudah maju. Hal yang sangat penting dalam reformasi perpajakan adalah peningkatan kepatuhan yang mungkin lebih penting daripada perubahan struktural dan sistem perpajakan (Perry dan Whalley, 2000) dalam Sitanggang (2009).

2.1.8 Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Pajak

Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro, 2010).

Pada pengetahuan peraturan pajak sangat penting untuk mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya sistem perpajakan suatu negara yang adil dan kualitas pengetahuan semakin baik akan muncul sikap yang benar untuk memenuhi kewajiban. Persepsi positif terhadap pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam masyarakat. Semakin meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak baik secara formal maupun non formal akan meningkatkan juga kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penyuluhan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak secara intensif dan terus menerus sehingga akan meningkatkan kontribusi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (Hidayatulloh, 2015).

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman pajak mereka. Kesadaran pajak inilah yang paling sering menjadi kendala untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat karena pengetahuan dan pemahaman perpajakan masih rendah di kalangan masyarakat. pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Pembayaran pajak dilakukan dengan syarat ada kepemilikan NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT.

Masyarakat tahu tentang peraturan perpajakan namun tidak sepenuhnya dipahami maksud yang terkandung dari peraturan tersebut, sehingga mengabaikan peraturan dan tidak takut terhadap sanksi yang akan diterima. Selain itu, banyak juga yang tahu dan paham maksud dari peraturan tersebut tetapi berusaha untuk mencari celah agar bisa melakukan penghindaran pajak.

2.1.9 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2009). Sanksi pajak ini menjadi alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Resmi (2003) sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Langkah penegakan hukum tersebut dimulai dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, sehingga diperlukan tenaga pemeriksa pajak yang mempunyai kuantitas dan kualitas memadai.

Dalam Undang-undang ketentuan perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi bagi wajib pajak, yang terutang dalam pasal 39 dan 39A.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang (UU) Perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu (Ilyas dan Burton, 2010):

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

2.2 Telaah (Review) Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Feby Eileen Wanarta dan Yenny Mangoting (2014)	Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak	Niat WP (X1) norma subyektif (X2) kontrol perilaku (X3) Niat WP untuk melakukan penggelapan pajak (Y)	Analisis regresi berganda	1. Hipotesis niat dan norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan. 2. Hipotesis kontrol perilaku tidak berpengaruh secara signifikan.
2.	Yola Febriani Syahputri (2015)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak	Sikap (X1) Norma Subyektif (X2) Niat (X3) Kontrol Perilaku (X4) Niat berperilaku tidak patuh (Y1) Kontrol perilaku (X5) Pengetahuan perpajakan (X6) Niat (X7) Ketidak patuhan pajak (Y2)	Analisis regresi berganda	1. Hipotesis sikap, kewajiban moral terhadap Niat berperilaku tidak patuh diterima. 2. Hipotesis Norma subyektif dan Kontrol perilaku terhadap Niat berperilaku tidak patuh ditolak atau tidak

					<p>diterima.</p> <p>3. Kontrol perilaku terhadap ketidakpatuhan WP ditolak. Pengetahuan pajak terhadap ketidakpatuhan diterima.</p>
3.	Yesi Mutia Basri, Raja Adri Satriawan Surya (2014)	Pengaruh keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas terhadap niat dan ketidakpatuhan pajak	<p>(H1) Keadilan sistem perpajakan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.</p> <p>(H2a) Norma sosial terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.</p> <p>(H2b) Norma Moral terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.</p> <p>(H3a) Risiko terdeteksinya kecurangan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.</p> <p>(H3b) Risiko terdeteksinya kecurangan terhadap ketidakpatuhan</p>	<i>Incidentl sampling, survey kuesioner</i>	<p>1. Persepsi terhadap keadilan, norma sosial, dan norma moral berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh.</p> <p>2. Terdeteksinya resiko kecurangan oleh petugas pajak tidak mempengaruhi niat dan perilaku WP untuk tidak patuh.</p> <p>3. Sanksi yang diberikan oleh pemerintah tidak mempengaruhi niat seseorang untuk tidak</p>

			<p>WP. (H4a) Besarnya sanksi terhadap niat berperilaku tidak patuh. (H4b) Besarnya sanksi terhadap ketidakpatuhan WP. (H5a) Religiusitas terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh. (H5b) Religiusitas terhadap ketidakpatuhan WP.</p>		<p>patuh, tetapi berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh. 4. Tingkat religiusitas WP tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. dan religiusitas berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh.</p>
4.	Fitriana Dikky Retyowati (2016)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sukoharjo	<p>H0: ketidakpatuhan WP H1: Keadilan sistem H2: Norma Sosial H3: Norma Moral H4: Norma Subjektif H5: Risiko terdeteksinya kecurangan H6: Besarnya Sanksi H7: Religiusitas H8: Niat berperilaku tidak patuh</p>	<i>Incidental sampling, survey kuesioner</i>	<p>variabel persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, norma sosial, norma moral, norma subyektif, risiko deteksi, besarnya sanksi, religiusitas dan niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak wajib pajak</p>
5.	Paisal Amir	Analisis Faktor-faktor yang	H0: ketidakpatuhan	Analisis Faktor,	1. Faktor yang mempengaruhi

	Zaini (2010)	mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi	wajib pajak orang pribadi H1: Sikap H2: Norma subyektif H3: Kewajiban Moral H4: Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan H5: Niat H6: etika	kuesioner.	hi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi adalah Sikap, norma subyektif, kewajiban moral, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan niat. 2. Faktor yang tidak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak adalah variabel etika.
6.	Arniati (2009)	Peran <i>Theory of Planned Behaviour</i> dan Etika Terhadap Ketaatan Pajak	Sikap terhadap Perilaku (X1) Norma Subyektif (X2) Kontrol Perilaku yang diterima (X3) Etika (X4) Niat (Y1) Kepatuhan Pajak (Y2)	Metode regresi linier berganda	1. Norma subyektif dan pengawasan perilaku yang diterima mempengaruhi niat kepatuhan pajak dari dimensi niat untuk patuh. 2. Faktor yang tidak berpengaruh terhadap variabel niat yaitu sikap,

					norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan etika.
7.	Pricilia Gladios Kaunang dan Sherly Pinatik (2016)	Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado	Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) Sanksi Perpajakan (X2) Persepsi atas perilaku ketidakpatuhan membayar pajak (Y)	Metode analisis regresi linear berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. 2. Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak.
8.	Rifandhi Nur Akbar (2015)	Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan	Pemahaman Wajib Pajak (X1) Kualitas Pelayanan Pajak (X2) Pelaksanaan Sanksi Pajak (X3) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Regresi berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang

		Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di Kota Malang)			berada di kota Malang. 2. Pelaksanaan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di kota Malang.
9.	Asrofi Langgeng Noermansya dan Ibnun Aslamadin (2019)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan Wajib Pajak Daerah Di Kota Tegal	Kewajiban Moral (X1) Kontrol Perilaku (X2) Norma Subyektif (X3) Sikap (X4) Niat Ketidakpatuhan (Y)	Regresi Linier Berganda	1. Variabel kewajiban moral dan sikap tidak berpengaruh terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah di Kota Tegal. 2. Variabel kontrol perilaku dan norma subyektif berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah di Kota Tegal.
10.	Endang Sri	Faktor-faktor Yang	Sikap (X1) Norma	Regresi Linier	Variabel sikap, norma

	Winarsih	Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukoharjo)	Subyektif (X2) Kewajiban Moral (X3) Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (X4) Niat Ketidakpatuhan (Y)	Berganda	subyektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif terhadap niat ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
11.	Nur Kasma Dewi, Junaidi, dan Salman Jumaili (2016)	Analisis Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empirik Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi)	Sikap (X1) Norma Subyektif (X2) Kewajiban Moral (X3) Kontrol Keperilaku yang Dipersepsikan (X4) Kontrol Keperilaku yang Dipersepsikan (X5) Niat <i>Tax Professional</i> untuk Berperilaku Tidak Patuh (X6) Kondisi Keuangan Perusahaan (X7) Fasilitas Perusahaan (X8) Iklim Keorganisasian (X9) <i>Account Represintative</i>	<i>Structure Equation Modeling (SEM)</i>	1. Variabel Sikap, Norma subyektif, Kewajiban moral, Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat <i>tax professional</i> untuk berperilaku tidak patuh. 2. Variabel Kontrol perilaku yang dipersepsikan, Niat <i>tax professional</i> untuk berperilaku

			(X10) Niat <i>tax professional</i> untuk berperilaku tidak patuh (Y1) Ketidakpatuhan pajak badan (Y2)		tidak patuh, Kondisi Keuangan, dan Fasilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan. 3. Iklim keorganisasian dan <i>Account representative</i> berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak badan.
12.	Deviananda Syarahutri (2017)	Pengaruh <i>Theory Of Planned Behavior</i> , Kewajiban Moral dan Budaya Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas	Sikap (X1) Norma Subyektif (X2) Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (X3) Kewajiban Moral (X4) Budaya Pajak (X5) Niat Ketidakpatuhan Pajak (Y)	Regresi Linier Berganda	1. Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di wilayah KPP Malang Utara. 2. Variabel Norma subjektif, Kontrol perilaku yang

					dipersepsikan, Kewajiban moral, dan Budaya pajak tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas di wilayah KPP Malang Utara.
13.	Suryani Taher (2011)	Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung	Tingkat Pendidikan (X1) Persepsi Wajib Pajak (X2) Lingkungan Usaha (X3) Pengetahuan Perpajakan (X4) Tarif Pajak (X5) Profitabilitas (X6) Pemeriksaan Pajak (X7) Kualitas Pelayanan (X8) Kondisi Perekonomian (X9) Hukum yang Berlaku (X10) Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisi Regresi	- Variabel Persepsi wajib pajak, Lingkungan usaha, Pengetahuan perpajakan, Tarif pajak, Profitabilitas, Pemeriksaan pajak, Kualitas pelayanan, Kondisi perekonomian, dan Hukum yang berlaku berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

				-	Tingkat pendidikan formal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap ketidakpatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	---	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sikap Keperilakuan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

UMKM bidang Konveksi di Kabupaten Tegal

Ajzen (1991) berpendapat bahwa sikap merupakan perasaan yang memihak (*favorableness*) atau perasaan yang tidak memihak (*unfavorableness*) pada suatu objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Hal yang diketahui, diyakini dan dialami wajib pajak menyebabkan sikap terhadap ketidakpatuhan pajak dalam pelaksanaan peraturan perpajakan (Syahputri, 2015). Perilaku ketidakpatuhan wajib pajak terjadi jika Wajib Pajak memiliki keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak yang positif atau negatif merupakan hasil dari keyakinan Wajib Pajak mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak tersebut, yang selanjutnya Wajib Pajak akan membentuk perilaku supaya patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika wajib pajak memiliki sikap yang negatif untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka wajib pajak telah memiliki keyakinan bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang tidak menguntungkan bagi dirinya.

Hasil penelitian dari Zaini (2010) menyatakan bahwa sikap merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal yang sama juga dijelaskan oleh penelitian Syahputri (2015) bahwa variabel sikap terhadap niat berperilaku tidak patuh diterima. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Arniati (2009) yang mendapatkan hasil faktor sikap tidak berpengaruh terhadap kepatuhan melalui variabel sikap. Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengaruh Sikap Terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak berpengaruh positif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi di Kabupaten Tegal

2.3.2 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi di Kabupaten Tegal.

Ajzen (1991) menyatakan dipenelitiannya tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melakukan atau tidaknya suatu perilaku disebut norma subjektif. Norma subjektif ini menjadi fungsi dari keinginan yang dipersepsikan individu ketika orang disekitarnya (misal, keluarga, kerabat, teman) menyepakati akan melakukan suatu sikap tertentu untuk mendorong orang-orang disekitarnya agar mematuhi sikapnya.

Pengaruh sosial tersebut dapat berasal dari lingkungan sekitar individu yang bersangkutan. Apabila orang lain menilai bahwa tidak mematuhi peraturan perpajakan adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan, maka individu akan cenderung berniat untuk mematuhi perpajakan, dan sebaliknya jika orang lain mempengaruhi untuk tidak patuh dengan alasan-alasan yang dapat diterima, maka juga akan mempengaruhi untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Norma subjektif ini bisa dikatakan sejauh mana dalam mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya.

Individu akan mengabaikan pandangan orang lain jika merasa hal itu merupakan hak pribadinya dalam melakukan sesuatu dan bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya.

Hasil penelitian oleh Syahputri (2015) memperoleh hasil bahwa norma subyektif tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Retyowati (2016), Wanarta dan Mangoting (2014), dan Zaini (2010) menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat yakni teman, keluarga, atasan dan petugas pajak yang terefleksikan didalam norma subjektif yang mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh. Berdasarkan hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Norma Subjektif berpengaruh negatif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM dibidang Konveksi di Kabupaten Tegal.

2.3.3 Pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM dibidang Konveksi Kabupaten Tegal.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 2005). Adanya actual control dapat memengaruhi secara langsung individu untuk dalam melakukan perilaku di luar kehendaknya. Semakin besar dan kuat niat seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu terjadi karena adanya sikap positif terhadap perilaku dan norma subyektif. Hal ini sesuai dengan kondisi pengendalian yang ada di lapangan (*actual behavioral control*) saat ada kesempatan maka niat tersebut akan diwujudkan. Sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk memunculkan perilaku

sehingga dengan cepat akan mempengaruhi kontrol perilaku individu tersebut. Perilaku yang ditampilkan sudah tidak sama lagi dengan niat karena kontrol perilaku telah berubah.

Zaini (2010) telah membuktikan secara empiris bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan salah satu faktor dari ketidakpatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Syahputri (2015), Wanarta dan Mangoting (2014) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak mempengaruhi ketidakpatuhan pajak. Sehingga dari uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kontrol Perilaku berpengaruh negatif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi di Kabupaten Tegal.

2.3.4 Pengaruh Pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di Kabupaten Tegal.

Pengetahuan perpajakan seperti peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi dan peranan pajak adalah hal yang harus diketahui secara umum di perpajakan. Zainuddin (2017) berpendapat bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan yaitu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan juga menerapkan pengetahuannya untuk membayar pajak. Menurut (Susherdianto dan Haryanto, 2012) perilaku wajib pajak dalam mengambil keputusan mengenai perilaku kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara internal. Namun, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk

meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dibidang perpajakannya.

Syahputri (2015) dan Kaunang (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Akbar (2015) memperoleh hasil pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang. Penelitian tersebut menduga masih banyak wajib pajak UMKM di kota Malang yang belum memahami perpajakan dengan baik, sehingga pada saat dihadapkan dengan masalah perpajakan mereka cenderung menganggap pajak itu hal yang rumit dan lebih memilih menghindar. Berdasarkan dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM dibidang Konveksi di Kabupaten Tegal.

2.3.5 Pengaruh sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di Kabupaten Tegal.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Arum, 2012). Sanksi perpajakan menurut Susherdianto dan Haryanto (2012) adalah hukuman yang diberikan dari otoritas pajak kepada wajib pajak yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. menurut Mardiasmo (2016) dalam bukunya menyatakan yang dimaksud sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan penilaian wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib

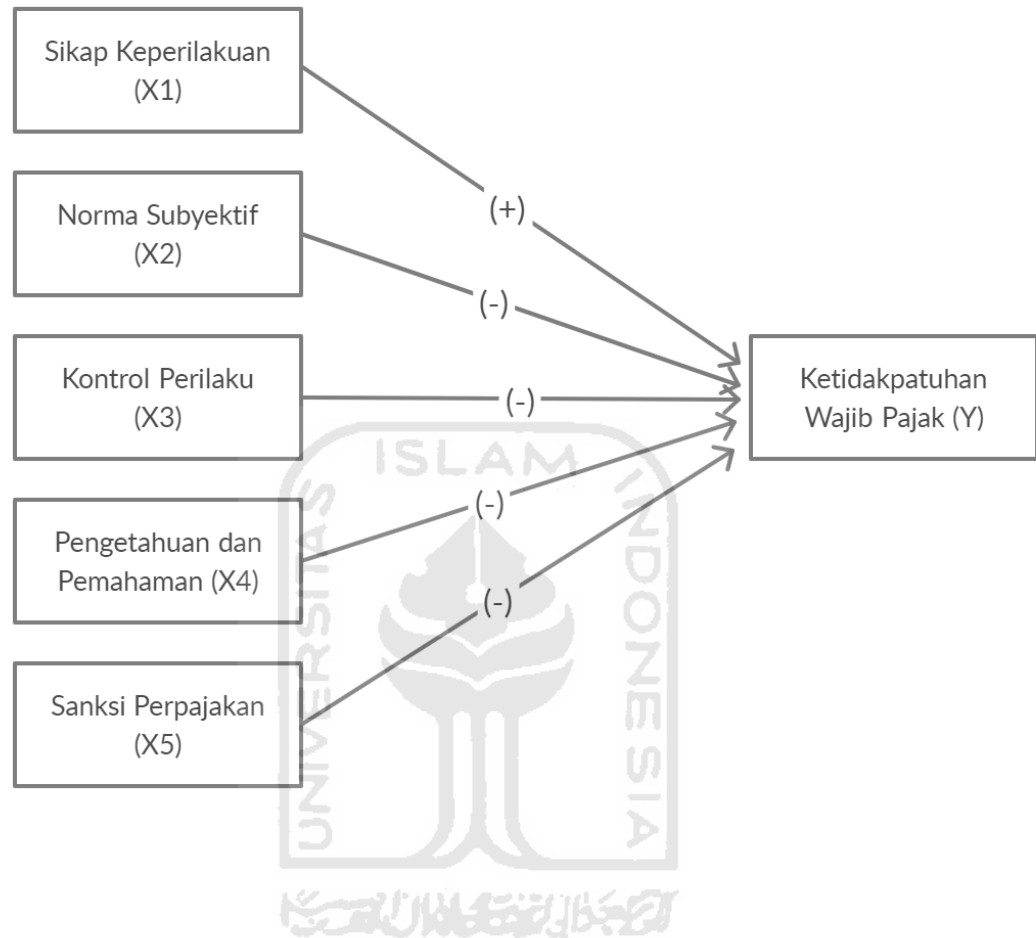
pajak untuk taat pajak. Efek jera yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan adalah tujuan dari penerapan sanksi perpajakan (Masruroh dan Zulaikha, 2013). Apabila sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jelas bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Richard Burton (2003) menyatakan bahwa: Kaidah hukum (hukum pajak) berupa sanksi pidana maupun administrasi pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar.

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi pajak, Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan besarnya tarif sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak dan penetapan besarnya tarif sanksi ini tentunya telah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ketentuan besarnya tarif sanksi administrasi diatur dalam Undang-undang Perpajakan. hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak, sehingga mereka menetapkan sanksi sewenang-wenang dan pada akhirnya justru memberikan bahkan merugikan Wajib Pajak. Wajib pajak yang patuh akan menghindari dari sanksi yang akan dikenakan, karena bagi wajib pajak yang mengetahui sanksi tersebut akan merugikan dirinya sendiri. Pada penelitian yang diteliti oleh Retyowati (2016), Kaunang dan Pinatik (2016) menyatakan bahwa besarnya sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. hasil penelitian yang berbeda dijelaskan oleh Basri dan Surya (2014) dimana Sanksi yang yang diberikan oleh pemerintah tidak mempengaruhi niat seseorang untuk tidak patuh. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini berhipotesis bahwa:

H5: Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap Ketidakepatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di Kabupaten Tegal.

2.4 Kerangka Penelitian

Gambar 2.4 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh pengusaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang konveksi yang berdomisili di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah di mana jumlahnya tidak diketahui.

3.2 Sampel

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang diperoleh dengan membagikan sebanyak 100 kuesioner kepada para responden, dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah para pengusaha UMKM yang bergerak dalam bidang konveksi yang berdomisili di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Pada penelitian ini, pengambilan sampel penelitian digunakan dengan metode *purposive random sampling*. Penelitian ini menggunakan metode *purposive random sampling* dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria yang ditetapkan pada penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang bergerak dalam bidang konveksi yang melakukan kegiatan usaha konveksi dengan omzet dibawah Rp. 4,8 Miliar per tahun di kab. Tegal, Jawa Tengah.

Tidak diketahuinya jumlah populasi, maka penelitian ini menggunakan rumus Lemeshbow (1997) untuk menentukan jumlah sampel minimal yang diperlukan, bentuk rumus tersebut adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{p(1-p)(z_{1-\alpha/2})^2}{D^2}$$

Di mana:

N= Jumlah sample minimal yang

diperlukan Z= tingkat kepercayaan p=

maximal estimation (0,5)

D= limit dari eror atau presisi absolut

Melalui rumus diatas, peneliti akan menentukan jumlah sample dengan data dibawah ini: Z= 95%

p= 0,5

D= 10%

$$n = \frac{p(1-p)(z_{1-\alpha/2})^2}{D^2}$$

$$n = \frac{0,5(1-0,5)(1,96^2)}{(0,1^2)} = 96,04 = 100$$

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini data kuantitatif yaitu data yang diukur dengan skala numerik. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan mengumpulkan data primer melalui proses penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi dan dijawab oleh responden. Pada kuesioner ini terdapat dua bagian, bagian yang

pertama berisi data responden dan bagian dua berisi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di kab. Tegal, Jawa Tengah. Kuesioner disebarakan secara langsung ke wajib pajak UMKM bidang konveksi yang ditemui di tempat usahanya. Setiap instrumen harus mempunyai skala pengukuran, guna menciptakan data kuantitatif yang tepat.

Acuan dalam menentukan panjang atau pendeknya interval yang ada pada alat ukur untuk menghasilkan satu data kuantitatif menggunakan skala pengukuran. Skala yang digunakan oleh peneliti yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial (Sugiono, 2014).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuesioner untuk mengukur variabel ketidakpatuhan wajib UMKM bidang konveksi di kab. Tegal. Variabel yang akan diukur diuraikan menjadi indikator variabel dengan menggunakan skala likert. Peneliti memakai lima skala Likert yang akan digunakan yaitu:

- a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5
- b. Setuju (S) diberi skor 4
- c. Ragu-ragu (R) diberi skor 3
- d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu

ketidakpatuhan wajib pajak dan untuk variabel independen nya ada lima yaitu norma subyektif, sikap terhadap perilaku, kontrol perilaku, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

3.4.1 Variabel Dependen

3.4.1.1 Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM yang dimaksud pada penelitian ini yaitu ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peneliti mengukur variabel dengan menggunakan instrumen Likert yaitu dengan cara membagikan kuesioner yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Mustikasari (2007), yaitu:

1. Ketidakpatuhan penyerahan SPT (*filing noncompliance*)
2. Ketidakpatuhan pembayaran (*payment noncompliance*)
3. Ketidakpatuhan pelaporan (*reporting noncompliance*)

3.4.2 Variabel Independen

3.4.2.1 Sikap Terhadap Perilaku

Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aspek perasaan yang dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Pengukuran variabel ini mereplikasikan penelitian terdahulu oleh Tarjo (2009) dalam Zaini (2010), yaitu:

1. Keinginan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya
2. Pemanfaatan pajak yang tidak transparan
3. Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan

4. Biaya suap kepada petugas pajak lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat
5. Sulitnya peraturan perpajakan

3.4.2.2 Norma Subyektif

Norma Subyektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah norma subyektif terhadap ketidakpatuhan pajak, bagaimana orang-orang disekitar wajib pajak dapat memengaruhi wajib pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM. Pengukuran norma subyektif yang digunakan dalam penelitian ini mereplikasi penelitian Zaini (2010), yaitu: keluarga, teman, pasangan, konsultan pajak, petugas pajak, rekan bisnis yang memotivasinya untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh tergantung dari kepribadian orang yang berhubungan ketika menghadapi orang lain. Pengukuran indikator pada norma subyektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota keluarga, teman, pasangan, rekan bisnis, dan petugas pajak.

3.4.2.3 Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak UMKM tentang seberapa kuat kendali yang akan menghambat wajib pajak dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Pengukuran kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dengan menggunakan instrumen kuisisioner yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang telah dikembangkan oleh Zaini (2010) yaitu kemungkinan diperiksa petugas pajak, kemungkinan dikenai sanksi (sanksi administrasi dan pidana), dan kemungkinan pelaporan pihak ketiga.

3.4.2.4 Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman dalam peraturan perpajakan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu persepsi wajib pajak memahami tentang hal-hal dalam perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan perpajakan. Hal-hal dalam perpajakan yang meliputi tata cara membayar pajak, undang-undang perpajakan, mengetahui laporan SPT, dan mengetahui besaran tarif pajak. Pengetahuan dan pemahaman dalam peraturan perpajakan dengan menggunakan instrumen kuisioner yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang telah dikembangkan oleh

Susherdianto (2014) yaitu:

1. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak
4. Memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP
5. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan.

3.4.2.5 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu hukuman bagi seseorang yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan ini merupakan hukuman bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya termasuk melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Pengukuran sanksi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner yang digunakan oleh penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh Susherdianto (2014) dan menambahkan dari Benk et al, (2011) dalam Basri (2012) yaitu:

1. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang cukup berat

2. Sanksi administrasi dapat dikenakan bagi pelanggar aturan pajak yang sangat ringan
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak
4. Pemerintah akan menjatuhkan hukuman jika menemukan saya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak
5. Pemerintah belum serius untuk menjatuhkan hukuman jika administrasi pajak menemukan bahwa Saya tidak melaporkan beberapa atau semua pendapatan kena pajak.

Tabel 3.1 Variabel Independen

Variabel	Kode	Indikator	Sumber
Sikap berperilaku	SK1	Keinginan membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya	(Zaini, 2010)
	SK2	Pemanfaatan pajak yang tidak transparan	
	SK3	Perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan	
	SK4	Biaya suap kepada petugas pajak lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang bisa dihemat	
	SK5	Sulitnya peraturan perpajakan	
	NS1	Teman	
	NS2	Pasangan	

Norma Subyektif	NS3	Anggota Keluarga	(Zaini, 2010)
	NS4	Rekan Bisnis	
	NS5	Petugas Pajak	
Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan	KP1	Kemungkinan diperiksa petugas pajak	(Zaini, 2010)
	KP2	Kemungkinan dikenai Sanksi (administrasi dan pidana)	
	KP3	Kemungkinan pelaporan pihak pajak	
Pemahaman dan Pengetahuan Pengaturan Perpajakan	PP1	Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak	Susherdianto (2014)
	PP2	Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan	
	PP3	Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak	
	PP4	Memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan KPP	

	PP5	Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan	
Sanksi Perpajakan	SP1	Pemerintah akan menjatuhkan sanksi pidana jika saya melanggar aturan pajak yang cukup berat	Susherdianto (2014) dan Benk et al, (2011) dalam Basri (2012)
	SP2	Pemerintah akan menjatuhkan sanksi administrasi jika saya melanggar aturan pajak yang ringan	
	SP3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak	
	SP4	Pemerintah akan menjatuhkan hukuman jika menemukan saya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak	

	SP5	Pemerintah belum serius untuk menjatuhkan hukuman jika administrasi pajak menemukan bahwa Saya tidak melaporkan beberapa pendapatan kena pajak	
Ketidakpatuhan Wajib Pajak	KWP1	Saya tidak pernah melaporkan SPT tepat waktu	Mustikasari (2007)
	KWP2	Saya mengurangi besarnya pembayaran pajak dari yang seharusnya, karena membayar pajak merugikan pribadi saya	
	KWP3	Saya tidak melaporkan kegiatan usaha yang saya miliki kepada Direktorat Jendral Pajak	

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

3.5.1 Uji Validitas

Untuk mengukur suatu keandalan sah atau tidaknya kuesioner maka dilakukan uji validitas. Apabila kuesioner telah mengungkapkan pertanyaan yang sudah sesuai dengan tujuannya maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid. Peneliti menggunakan uji validitas dengan membandingkan angka korelasi *product moment* Pearson r hitung dan r tabel dengan tingkat signifikansi 5% dari *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dimana n adalah jumlah sampel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka suatu indikator dikatakan valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur suatu indikator dari variabel yang digunakan apakah dapat menghasilkan data yang handal apabila memberikan hasil yang stabil dan konsisten. Pada perhitungan uji reliabilitas ini menggunakan metode *Cornbach Alpha* (α) dengan SPSS. Data yang mempunyai tingkat keandalan yang tinggi jika nilai *Cornbach Alpha* diatas $> 0,60$ (Ghozali, 2009)

3.5.3 Uji Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu pengujian variabel yang ditujukan untuk menguji pengaruh distribusi normal atau tidaknya dari variabel terikat dan variabel bebas dari suatu penelitian. Hasil uji normalitas yang berdistribusi normal dibuktikan dengan menggunakan grafik *normal probability plots* dan uji

kolmogorov smirnov dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%.

3.5.3.2 Uji Multikorelinearitas

Multikorelitas merupakan suatu situasi dimana adanya korelasi sempurna antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lainnya. Uji multikorelitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikorelinearitas di dalam model regresi tersebut, yaitu melihat dari nilai *tolerance* dan lainnya yaitu *Variance*

Inflation Factor (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikorelitas adalah nilai *tolerance* $\leq$ atau sama dengan VIF ≥ 10 .

Langkah-langkah dalam uji multikorelasitas adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan Nilai Tolerance
 - a. Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$, maka terjadi multikorelinealitas
 - b. Apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$, maka tidak terjadi multikorelinearitas
2. Menggunakan Nilai *Value Inflation Factor* (VIF)
 - a. Apabila nilai VIF ≤ 10 , maka tidak terjadi multikorelinealitas
 - b. Apabila nilai VIF ≥ 10 , maka tidak terjadi multikorelinealitas

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian yang digunakan pada sebuah model regresi. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apabila pada suatu model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan. Model regresi dikatakan sebagai suatu model regresi dengan kualitas baik apabila terdapat homoskedastisitas. Pendeteksian ini, dapat dilakukan dengan melihat pola yang terbentuk pada sebuah diagram pancar dengan ketentuan:

1. Jika diagram pencar yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas.
2. Jika diagram pencar tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.4 Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, yaitu untuk menguji pengaruh atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dengan bantuan program *SPSS* dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 SK + \beta_2 NS + \beta_3 KP + \beta_4 PP + \beta_5 SP + e$$

Y	=	Ketidakpatuhan wajib pajak
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien regresi
e	=	Error
SP	=	Sikap Keperilakuan
NS	=	Norma Subyektif
KP	=	Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan
PP	=	Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan
SP	=	Sanksi Perpajakan

3.5.5 Uji Model

3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R²)

Pengukuran koefisien determinasi pada suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi

variabel dependen (Ghozali, 2009). Apabila hasil R^2 mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat dari suatu penelitian.

3.5.5.2 Uji Statistik F

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji kelayakan dari suatu model penelitian. Apabila hasil analisis memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model tersebut dianggap layak. Model pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 (5%).

3.5.5.3 Uji Statistik T

Uji T merupakan suatu pengujian parsial. Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi dari variabel bebas dan variabel terikat dari suatu penelitian. Dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t adalah:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel bebas secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel bebas secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai analisis data dan pembahasan dari pengujian-pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Hasil pengujian merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang dikemukakan dapat diterima atau tidak.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuisioner untuk pengumpulan data, seperti yang sudah dijelaskan pada bab tiga. Subyek penelitian ini merupakan Wajib Pajak yang mempunyai usaha rumahan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibidang konveksi seperti usaha bordir, pakaian jadi, dan kebutuhan sandang lainnya yang berjumlah 100 responden. Sampel adalah wajib pajak UMKM bidang konveksi yang berada di wilayah Kabupaten Tegal dengan kriteria yang telah beroperasi minimal 1 tahun.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada penelitian ini ditentukan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, penjualan per-tahun, dan kepemilikan NPWP.

Berikut tabel 4.2 yang menyajikan karakteristik responden:

Tabel 4.1 Profil Wajib Pajak

Profil	Kriteria	Jumlah (orang)	Presentase
Jenis Kelamin	Pria	59	59%
	Wanita	41	41%
	Total	100	
Usia	<20 Tahun	5	5%
	20 - 30 Tahun	23	23%
	31 - 40 Tahun	32	32%
	41 - 50 Tahun	18	18%
	>50 Tahun	22	22%
	Total	100	100%
Pendidikan	SMA/Sederajat	61	61%
	D3	7	7%
	S1	32	32%
	S2	0	0%
	Total	100	100%
Pendapatan per Tahun	< Rp.500 jt	79	79%
	Rp. 500jt - Rp.1M	18	28%
	Rp. 1M - Rp.4,8M	3	3%
	> Rp. 4,8M	0	0%
	Total	100	100%
Kepemilikan NPWP	Sudah ada	25	25%
	Belum ada	75	75%
	Total	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah wajib pajak laki-laki sebanyak 59 orang atau 59% dan perempuan sebanyak 41 orang atau 41%. Hal ini menunjukan pengisian kuisioner pada penelitian ini didominasi oleh laki-laki dengan presentase 59%.

Dengan melihat struktur umur wajib pajak UMKM bidang konveksi di Kabupaten Tegal dapat dilihat bahwa mayoritas yang mengisi kuisioner berumur antara 31 – 40 tahun yaitu sebanyak 32 orang atau 32%, yang berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 5 orang atau 5%, berusia 20 – 30 tahun sebanyak 23 orang atau 23%, berusia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang atau 18%, dan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 22 orang atau 22%.

Dari hasil penelitian bahwa responden sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA dan sederajat sebanyak 59 orang atau 59%, lulusan D3 sebanyak 7 orang atau 7%, lulusan S1 sebanyak 32 orang atau 32%, dan pada penelitian ini tidak ada reponden yang berlatar belakang S2.

Berdasarkan tingkat pendapatan responden per tahun menunjukan bahwa awajib pajak sebagian besar telah berpendapatan kurang dari Rp. 50.000.000 sebanyak 79 orang atau 79%, pendapatan antara Rp. 50.000.000 – Rp. 1.000.000.000 sebanyak 18 orang atau 18%, berpendapatan antara Rp. 1.000.000.000 – Rp. 4.800.000.000 sebanyak 3 orang atau 3%.

Sedangkan kepemilikan NPWP wajib pajak sebagian besar banyak yang belum memiliki NPWP yaitu 75 orang atau 75%, dan yang sudah mempunyai NPWP sebanyak 25 orang atau 25%.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali,

2009). Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation*, dengan membandingkan r hitung dan r tabel dengan tingkat signifikansi 5% dari *degree of freedom* (df) = $n - 2$ dimana n adalah jumlah sampel. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai r tabel untuk $N = 100$ pada signifikansi 5%, *degree of freedom* (df) = $100 - 2 = 98$. Lalu $\alpha = 0,05$ karena signifikansinya 5% maka ditemukan r tabel = 0,1966 (r tabel pada $df = 98$ dengan uji dua sisi). Selanjutnya, angka r tabel ini kemudian bandingkan dengan nilai r hitung yang telah diketahui dari nilai output SPSS. Jika nilai r hitung pada SPSS lebih besar dari r tabel, maka keputusan dalam uji validitas dapat dikatakan valid. Berikut tabel hasil uji validitas yang dilakukan melalui SPSS:

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Sikap berperilaku (SK)	SK1	0,776	0,1966	Valid
	SK2	0,725	0,1966	Valid
	SK3	0,704	0,1966	Valid
	SK4	0,662	0,1966	Valid
	SK5	0,659	0,1966	Valid
Norma Subyektif (NS)	NS1	0,812	0,1966	Valid
	NS2	0,753	0,1966	Valid
	NS3	0,734	0,1966	Valid
	NS4	0,782	0,1966	Valid
	NS5	0,690	0,1966	Valid
Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan (KP)	KP1	0,668	0,1966	Valid
	KP2	0,786	0,1966	Valid
	KP3	0,771	0,1966	Valid
	PP1	0,775	0,1966	Valid
	PP2	0,754	0,1966	Valid

Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan (PP)	PP3	0,793	0,1966	Valid
	PP4	0,812	0,1966	Valid
	PP5	0,620	0,1966	Valid
	SP1	0,775	0,1966	Valid
	SP2	0,754	0,1966	Valid
Sanksi Perpajakan (SP)	SP3	0,793	0,1966	Valid
	SP4	0,812	0,1966	Valid
	SP5	0,620	0,1966	Valid

Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa hasil uji validitas pada data diatas, variable sikap berperilaku (SK), norma subyektif (NS), kontrol perilaku (KP), pemahaman dan peraturan perpajakan (PP), sanksi perpajakan (SP), dan ketidakpatuhan wajib pajak (KWP) dinyatakan bahwa setiap indikator atau pertanyaan-pertanyaan pada seluruh variable tersebut memiliki nilai r hitung $> r$ tabel (0,1966) sehingga penelitian pada uji validitas ini dapat dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk (Ghozali, 2009). Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel.

Hasil dari pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*, jika nilai *alpha* $> 0,9$ artinya reliabilitas sempurna. Jika *alpha* antara 0,70 –

0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika *alpha* 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat. Jika *alpha* < 0,50 maka reliabilitas rendah. Jika *alpha* rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable.

Berikut adalah hasil analisis uji reliabilitas terhadap variabel yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas

Variable	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sikap berperilaku	0,779	Reliabilitas Tinggi
Norma Subyektif	0,794	Reliabilitas Tinggi
Kontrol Perilaku	0,798	Reliabilitas Tinggi
Pemahaman dan Pengetahuan	0,793	Reliabilitas Tinggi
Sanksi Perpajakan	0,793	Reliabilitas Tinggi
Ketidakpatuhan Perpajakan	0,815	Reliabilitas Tinggi

Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan yang digunakan adalah *reliable* atau dapat diandalkan. Dalam penelitian ini masing-masing indikator pertanyaan mempunyai nilai reliabilitas yang berbeda. Pada variabel sikap berperilaku (SK), norma subyektif (SK), kontrol perilaku (KP), pemahaman dan pengetahuan perpajakan (PP), dan ketidakpatuhan wajib pajak (KWP) memiliki nilai

cronbach's alpha diatas 0,70 yang artinya setiap variabel penelitian ini mempunya reliabilitas yang tinggi.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan analisis asumsi klasik agar tidak terjadi bias pada hasil kesimpulan yang dihasilkan pada suatu penelitian. Ada beberapa pengujian pada asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastitas.

4.4.1 Uji Normalitas

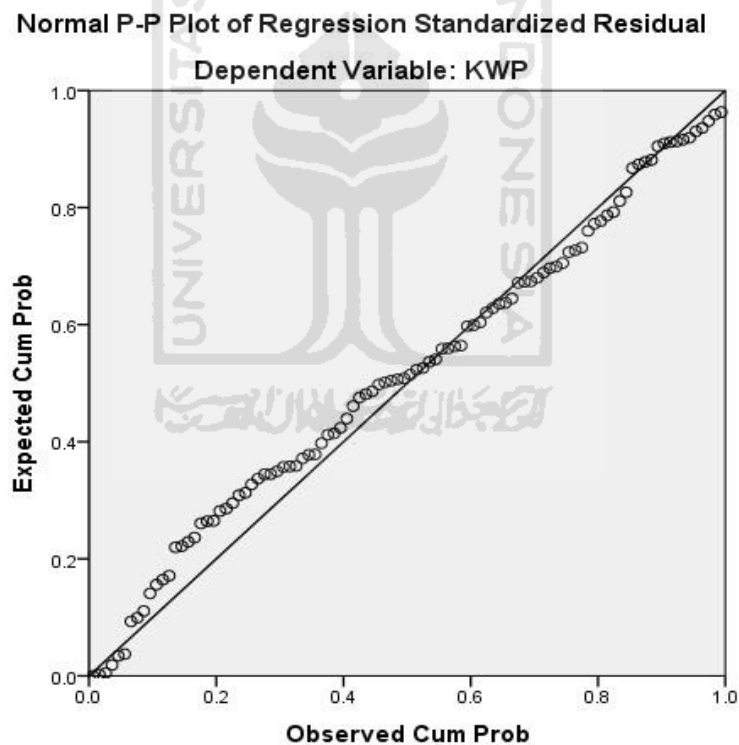
Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang ditunjukan untuk menilai sebaran data pada suatu penelitian. Pada pengujian ada dua cara untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis grafik atau uji statistik.

A. Analisis Grafik

Normalitas bisa dilihat dengan tabel histogram dengan menggunakan analisis grafik. Grafik histogram digunakan untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, sedangkan *probabilty plot* digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dan distribusi normal (Ghozali, 2011). Pada metode grafik, terdapat dua dasar pengambilan keputusan, yaitu:

- Data yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Data yang menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil analisis uji normalitas data dengan menggunakan grafik *probability plot* sebagai berikut:

Gambar 4.1 Uji Normalitas Histogram



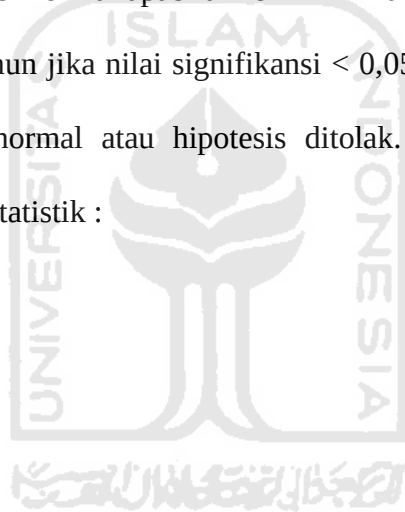
Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Grafik normal *probability plot* menggambarkan bahwa data mendekati distribusi normal. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa data menyebar disekitar

diagonal dan mengikuti arah grafik histogramnya. Hal ini menyatakan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

B. Analisis Statistik

Data yang digunakan akan lebih meyakinkan bahwa data tersebut terdistribusikan secara normal jika menggunakan uji statistik, Ghazali (2011). Pada metode statistik, uji normalitas dapat dideteksi dengan uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini dapat dilihat dengan nilai residual berdistribusi normal apabila memiliki nilai $> 0,05$ sehingga hipotesis dapat diterima. Namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak terdistribusi normal atau hipotesis ditolak. Berikut adalah hasil uji normalitas analisis statistik :



Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas dengan Analisis Statistik Non Parametrik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	11.8200000
	Std. Deviation	1.34718631
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.063
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Pada tabel 4.6 nilai N sebanyak 100 sample penelitian yang menunjukkan hasil uji *kolmogorov Smirnov*. Nilai signifikan (*2-tailed*) pada data penelitian ini adalah 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi (α) 0,05. Sehingga data penelitian secara keseluruhan dikatakan terdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolineritas

Ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas satu terhadap variabel bebas lainnya bisa diketahui dengan uji multikolineritas. Tujuan uji multikolineritas untuk menguji apakah ada korelasi pada model regresi diantara variabel independen. Pada

model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan *inflation factor* (VIF). Metode VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk mendeteksi tidak terjadinya multikorelitas dengan nilai VIF kurang dari 10, pada metode *tolerance* untuk mendeteksi tidak terjadinya multikorelitas dengan nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau 0,1. Berikut hasil uji multikolineritas data penelitian.



Tabel 4.8

Uji Multikolineritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sikap Keperilakuan	0,703	1,422	Tidak Terjadi Multikolineritas
Norma Subyektif	0,258	3.883	Tidak Terjadi Multikolineritas
Kontrol perilaku	0,958	1,044	Tidak Terjadi Multikolineritas
Pemahaman dan Pengetahuan	0,273	3.667	Tidak Terjadi Multikolineritas
Sanksi Perpajakan	0,860	1,163	Tidak Terjadi Multikolineritas

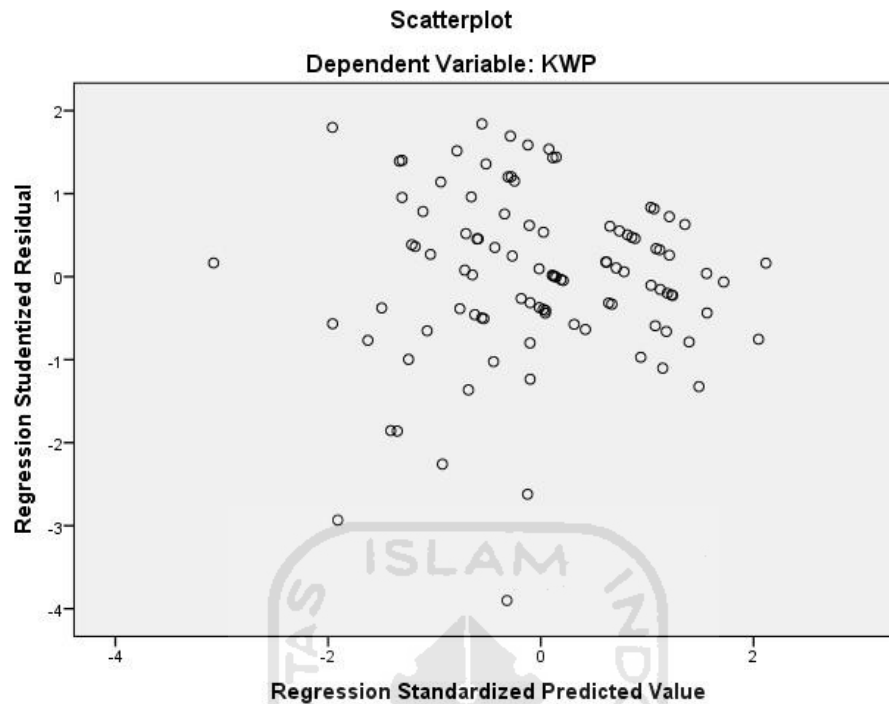
Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Dari hasil data 4.7 dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian menunjukkan hasil dari pengujian ini tidak terdapat multikolineritas, karena pada data diatas semua variabel menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau 0,1, dan nilai VIF kurang dari 10 persen atau 0,1. Pada uji multikolineritas data penelitian ini dinyatakan lolos uji asumsi klasik, sehingga data layak menggunakan model regresi.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi apabila pada suatu model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan. Menurut Ghazali (2011) Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Heterokedastisitas terjadi ketika titik membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit). Apabila tidak ada pola penyebaran maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambaran berikut:

Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Pada gambar 4.8 terlihat pola secara acak dan menyebar tidak menentu, sebaran data residual menyebar diatas dan dibawah angka 0 oada sumbu Y, maka pada penelitian ini data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya pada varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak ada ketidaksamaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini lolos uji asumsi klasik uji heteroskedastisitas sehingga data layak digunakan untuk model regresi.

4.5 Uji Regresi Berganda

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Variabel independen pada model penelitian ini adalah Sikap Keperilakuan (SK), Norma Subyektif (NS), Kontrol Perilaku (KP), Sanksi Perpajakan (SP) dan Pemahaman, dan

Pengetahuan Perpajakan (PP). Variabel dependennya yaitu Ketidakpatuhan Wajib Pajak (KWP). Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda terhadap variabel yang terdapat pada penelitian berikut:

Tabel 4.9

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	15.323	1.906		.000
	SK	.140	.063	.230	.029
	NS	.209	.102	.353	.043
	KP	.140	.089	.140	.119
	PP	.140	.089	.140	.119
	SP	-.349	.112	-.522	.002
		-.308	.056	-.518	.000
a. Dependent Variable: KWP					

Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji regresi berganda dapat ditulis persamaan sebagai berikut:

$$Y = 15,323 + 0,140SK + 0,209N + 0,140KP - 0,349PP - 0,309SP$$

Dari hasil model persamaan regresi diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai intercept konstanta sebesar 15,323. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila besar nilai seluruh variabel bebas adalah 15. Maka besarnya ketidakpatuhan wajib pajak akan sebesar 15,323.

2. Nilai koefisien regresi variabel Sikap Keperilakuan (SK) sebesar 0,140. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila sikap berperilakuan bertambah satu satuan maka pengungkapan ketidakpatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,140 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Norma Subyektif (NS) sebesar 0,209. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila norma subyektif bertambah satu satuan maka pengungkapan ketidakpatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,209 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel Kontrol Perilaku (KP) sebesar 0,140. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kontrol perilaku bertambah satu satuan maka pengungkapan ketidakpatuhan wajib pajak mengalami pengurangan sebesar 0,140 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan (PP) sebesar -0,349. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila pemahaman dan pengetahuan perpajakan bertambah satu satuan maka pengungkapan ketidakpatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar -0,349 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.
6. Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (SP) sebesar -0,308. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila norma Sanksi Perpajakan bertambah satu satuan maka pengungkapan ketidakpatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar -0,308 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan.

4.5.1 Koefisien Determinasi

Pengukuran koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen secara serentak.

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisiwen Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533 ^a	.284	.246	2.195
a. Predictors: (Constant), SP, NS, KP, SK, PP				

Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,246. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel independen dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 24,6% dan sisanya sebesar 75,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

4.5.2 Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah pengujian yang dilakukan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ada dua cara yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F, yaitu:

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari output Anova
 - Jika nilai Sig. < 0,05, maka model regresi layak untuk pengujian hipotesis.

- Jika nilai Sig. $> 0,05$, maka hipotesis model regresi tidak layak untuk pengujian hipotesis.

2. Berdasarkan Perbandingan Nilai F Hitung dengan F tabel

- Jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka model regresi layak untuk pengujian hipotesis.
- Jika nilai F hitung $< F$ tabel, maka model regresi tidak layak untuk pengujian hipotesis.

Tabel 4.11

Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	179.676	5	35.935	7.455	.000 ^b
	Residual	453.084	94	4.820		
	Total	632.760	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SP, NS, KP, SK, PP

Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000, karena nilai signifikan $F_{0,000} < 0,05$ sehingga pada pengujian F tabel, F tabel dicari pada distribusi nilai r tabel statisti pada signifikansi 0,05. Nilai F tabel dalam penelitian ini adalah 2,31. Berdasarkan tabel diatas F hitung sebesar 7,455. Karena nilai F hitung $7,455 > F$ tabel 2,31, maka pada uji F dapat disimpulkan model regresi layak untuk pengujian hipotesis.

4.5.3 Uji Statistik T

1. Berdasarkan hasil uji t, pada tabel 4.9 variabel sikap berperilaku menghasilkan angka sebesar 2,215 lebih besar dari t hitung (1,98552) yang dapat disimpulkan bahwa variabel ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sikap berperilaku secara individu.
2. Berdasarkan hasil uji t, pada tabel 4.9 variabel norma subyektif menghasilkan angka 2,050 lebih besar dari t hitung (1,98552) yang dapat disimpulkan bahwa variabel ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel norma subyektif secara individu.
3. Berdasarkan hasil uji t, pada tabel 4.9 variabel kontrol perilaku menghasilkan angka sebesar 1,573 kurang dari t hitung (1,98552) yang dapat disimpulkan bahwa variabel ketidakpatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel kontrol perilaku.
4. Berdasarkan hasil uji t, pada tabel 4.9 variabel pemahaman dan pengetahuan perpajakan menghasilkan angka sebesar 3,121 lebih besar dari t hitung (1,98552) yang dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel ketidakpatuhan wajib pajak.
5. Berdasarkan hasil uji t, pada tabel 4.9 variabel sanksi perpajakan menghasilkan angka sebesar 5,506 lebih besar dari t hitung (1,98552) yang dapat disimpulkan bahwa variabel ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sanksi perpajakan.

Hasil Uji Hipotesis

1. Pengujian Hipotesis H1

Pengujian terhadap hipotesis 1 dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sikap berperilaku (SK). Hipotesis H1 penelitian ini menyatakan bahwa sikap berperilaku (SK) berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi Sikap Berperilaku (SK) terhadap ketidakpatuhan wajib pajak yaitu 0,140 dan nilai signifikansi sebesar 0,029. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,029 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sehingga hipotesis H1 penelitian ini didukung oleh data.

2. Pengujian Hipotesis H2

Pengujian terhadap hipotesis 2 dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel norma subjektif. Hipotesis H2 penelitian ini menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi norma subjektif yaitu 0,209 dan nilai signifikansi 0,043. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi $0,043 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sehingga hipotesis H2 penelitian ini tidak didukung oleh data.

3. Pengujian Hipotesis H3

Pengujian terhadap hipotesis 3 dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel kontrol perilaku. Hipotesis H3 penelitian ini menyatakan bahwa

kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi kontrol perilaku yaitu 0,140 dan nilai signifikansi 0,119. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi 0,119 $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sehingga hipotesis H3 penelitian ini tidak didukung oleh data.

4. Pengujian Hipotesis H4

Pengujian terhadap hipotesis 4 dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Hipotesis H4 penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dipersepsikan yaitu -0,349 dan nilai signifikansi 0,002. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi 0,002 $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sehingga hipotesis H4 penelitian ini didukung oleh data.

5. Pengujian Hipotesis H5

Pengujian terhadap hipotesis 5 dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi perpajakan. Hipotesis H5 penelitian ini menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Besarnya koefisien regresi sanksi perpajakan yang dipersepsikan yaitu -0,308 dan nilai signifikansi 0,000. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut signifikan karena signifikansi 0,000 $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak sehingga hipotesis H5 penelitian ini didukung oleh data.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1 Pengaruh Sikap Keperilakuan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sikap Keperilakuan (SK) berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil ini didasarkan pada nilai signifikansi berada dibawah $\alpha = 5\%$ ($0,029 < 0,05$) dan nilai t-statistik yang berada di atas t-tabel sebesar $2,215 > 1,98552$. Maka semakin besar sikap keperilakuan pada wajib pajak umkm, menyebabkan semakin besar ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sikap keperilakuan berpengaruh secara signifikan.

Sikap merupakan perasaan yang mendukung atau tidak mendukung terhadap suatu obyek yang akan disikapi. Sikap keperilakuan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak apabila wajib pajak memiliki keyakinan dan evaluasi yang positif terhadap ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak yang mempunyai sikap keperilakuan ketidakpatuhan dalam membayar pajak, menjadikan wajib pajak tersebut mempunyai keyakinan-keyakinan tentang perilaku ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H1 didukung oleh penelitian terdahulu yang membuktikan variabel sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak seperti penelitian Zaini (2010), Syahputri (2015), Winarsih (2015), Dewi, Junaidi, dan Jumaili (2016), Syarahputri (2017). Karena wajib pajak

UMKM konveksi memiliki keyakinan bahwa membayar pajak tidak memberi manfaat bagi dirinya. Sehingga tindakan ini dapat menyebabkan wajib pajak UMKM bidang konveksi mempunyai sikap agar tidak mematuhi peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

4.7.2 Pengaruh Norma Subyektif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Norma Subyektif (NS) berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil ini didasarkan pada nilai signifikansi berada dibawah $\alpha = 5\%$ ($0,043 < 0,05$) dan nilai t-statistik yang berada di atas t-tabel sebesar $2,050 > 1,98552$. Maka semakin besar norma subyektif pada wajib pajak umkm, menyebabkan semakin besar ketidakpatuhan wajib pajak.

Norma subyektif merupakan persepsi seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang mempengaruhi tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Jika wajib pajak memiliki rasa hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dilakukan, maka akan mengabaikan tindakan yang akan dilakukan orang lain.

H2 tidak didukung karena hasil penelitian menunjukan variabel norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi tingkat norma subyektif akan semakin besar perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Zaini (2010), Wanarta dan Mangoting (2014), Winarsih (2015), Dewi, Junaidi, dan Jumaili (2016), Noermansyah dan Aslamadin (2019). Hal ini menunjukan wajib pajak mempertimbangkan orang-orang yang ada dilingkungan mereka mempengaruhi norma subyektif tentang

ketidakpatuhan pajak. Karena jika lingkungan wajib pajak memberikan dukungan agar tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka akan mempengaruhi untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Jika sebaliknya, ketika lingkungan sekitar wajib pajak memberikan motivasi untuk mematuhi perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung berniat untuk mematuhi peraturan perpajakan.

4.7.3 Pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal

Kontrol perilaku (KP) pada penelitian ini berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil ini didasarkan pada nilai signifikansi berada diatas $\alpha = 5\%$ ($0,119 > 0,05$) dan nilai t-statistik yang berada di bawah t-tabel sebesar $1,573 < 1,98552$. Hasil tersebut menunjukkan semakin besar kontrol perilaku pada wajib pajak umkm, tidak akan meningkatkan atau menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh variabel kontrol perilaku.

Kontrol perilaku merupakan seseorang yang memiliki kepercayaan mengenai sumber daya dan kesempatan yang dimiliki untuk melakukan perilaku yang dipertimbangkan. Ajzen (2002) menyatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol perilaku individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Winarta dan Mangoting (2014), Syahputri (2015), Dewi, Junaidi, dan Jumaili (2016), Syarahputri (2017), yang menyatakan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak wajib pajak. Kontrol perilaku dalam konteks perpajakan merupakan seberapa kuat

individu terhadap kontrol perilaku yang dapat mengendalikan dirinya termasuk tindakan agar tidak melanggar peraturan perpajakan. Apabila kontrol perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM di Kabupaten Tegal sangat kuat, maka hal-hal seperti tidak patuh terhadap peraturan perpajakan tidak akan terjadi. Berbeda jika wajib pajak UMKM yang memiliki kontrol perilaku yang lemah, maka wajib pajak tersebut cenderung mudah untuk berbuat hal-hal yang menyimpang, sehingga sangat mudah untuk melakukan tindakan ketidakpatuhan pembayaran pajak.

4.7.4 Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap

Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pemahaman dan Pengetahuan Peraturan Perpajakan (PP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil ini didasarkan pada nilai signifikansi dibawah diatas $\alpha = 5\%$ ($0,002 < 0,05$) dan nilai t-statistik yang berada di bawah t-tabel sebesar $3,121 > 1,98552$. Semakin besar pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan pada wajib pajak umkm, akan menyebabkan penurunan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa variabel pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Jika seorang wajib pajak paham dan mengerti akan pajaknya dan peraturan yang berlaku akan memiliki sikap yang lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan wajib pajak tentunya akan lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. karena semakin tinggi tingkat wajib pajak dalam memahami dan mengetahui peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan

wajib pajak untuk melanggar peraturan perpajakan yang ditetapkan. Jika pemahaman wajib pajak tentang perpajakan rendah, maka ketidakpatuhan wajib pajak akan tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Taher (2011), Syahputri (2015), dan Kaunang dan Pinatik (2016), yang menemukan bahwa terdapat persepsi wajib pajak tentang pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan dapat mendorong ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan, maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh atas kewajiban perpajakannya.

4.7.5 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

UMKM bidang Konveksi di Kab. Tegal.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan (SP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hasil ini didasarkan pada nilai signifikansi dibawah diatas $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai t-statistik yang berada di bawah t-tabel sebesar $5,506 > 1,98552$. Maka semakin besar sanksi perpajakan pada wajib pajak umkm, akan menyebabkan penurunan perilaku ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Tindakan dan niat terhadap pelaku dapat dikontrol dengan adanya sanksi, sehingga sanksi yang telah ditetapkan juga dapat mempengaruhi perilaku tidak patuh secara langsung. Apabila sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jelas

bahwa semakin tinggi sanksi yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Akbar (2015), Kaunang dan Pinatik (2016), Retyowati (2016), yang menemukan terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak tentang perilaku ketidakpatuhan membayar pajak. Richard Burton (2003) berpendapat bahwa Hukum pajak berupa sanksi pidana maupun administrasi pada dasarnya dimaksudkan untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar. Sistem pemungutan pajak yang berupa *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya walaupun sudah diberikan kepercayaan seperti itu. Dengan demikian penerapan sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menemukan bahwa sikap berperilaku dan norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di Kabupaten Tegal.
2. Hasil analisis variabel kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi.
3. Hasil analisis variabel pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan dan variabel sanksi terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi di Kabupaten Tegal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun keterbatasan yang pada penelitian ini, yaitu variabel yang digunakan oleh peneliti terbatas. Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independent seperti sikap berperilaku, norma subyektif, kontrol perilaku, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti, diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti kesadaran wajib pajak, keadilan sistem perpajakan, dan religiusitas wajib pajak.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada responden disamping menyebarkan kuesioner.

5.4 Implikasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak yang terkait mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi. Kesadaran wajib pajak yang tinggi dapat dibentuk melalui evaluasi dan keyakinan terhadap sistem perpajakan yang ada selama ini. Selain itu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi bagi wajib pajak harus dilakukan secara konsisten, serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakannya, sehingga semakin kecil wajib pajak untuk melanggar aturan-aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini juga dapat diberikan untuk instansi-instansi pemerintah agar wajib pajak mempunyai kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi mempunyai pengaruh yang besar terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan cara memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak UMKM bidang konveksi yang terdapat di kabupaten Tegal, agar wajib pajak UMKM bidang konveksi mempunyai motivasi yang besar dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pemerintah juga hendaknya ditingkatkan lagi dalam pemanfaatan fasilitas perpajakannya di instansi masing-

masing, sehingga kepedulian wajib pajak dalam memanfaatkan fasilitas yang ada akan semakin besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. N. (2015). Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM di Kota Malang). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Ajzen, Icek. (1988). *From Intentions to Actions. Attitudes, Personality and Behavior*. Milton Keynes: Open University Press dan Chicago, IL: Dorsey Press
- Ajzen, Icek. (1991). The Theory of Planned Behaviour, *Organizational Behavior and Human Decision Process* 50, 179-211.
- Ajzen, Icek. (2002). Constructing a TBP Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration. September (Revised January, 2006).
- Ajzen, Icek. (2005). *Attitudes, personality, and behavior*. New York. USA: Open University Press.
- Ajzen, I. (2006). Constructing a theory of planned behavior questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations, Occasional paper. [Http://people.umass.edu/aizen/](http://people.umass.edu/aizen/). 9 januari 2020.
- Almirhea, F. “ Peranan Ekonomi Lokal di Kabupaten Tegal “. <https://www.kompasiana.com/fathialmirhea/58a2e3d195937392126fefef/peranan-ekonomi-lokal-di-kabupaten-tegal?page=all>. *Kompasiana Beyond Blogging*. Diakses 20 Desember 2019.

- Arniati. (2009). Peran *Theori of Planned Behaviour* dan Etika Terhadap Ketaatan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Perpajakan II*. Universitas Trunojoyo. Madura
- Arum, H. P., (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Basri, Y. M., Surya, R. A. S., Fitriarsi, R., Novriyan, R., & Tania, T. S. (2012). Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Simposium Nasional Akuntansi*, 15.
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2014). “Pengaruh keadilan, norma ekspektasi, sanksi dan religiusitas terhadap niat dan ketidak patuhan pajak”. *Akuntabilitas*, 7(3), 162-176.
- Brown, R. E & Mazur, M. J. (2003). “IRS’S Comprehensive Approach to Compliance Measurement”. *National Tax Journal*, 689-700.
- Dessy, A. W., & Nourwahida, C. D. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres Jakarta Barat). *Skripsi*. S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dewi, N. K., & Jumaili, S. (2016). Analisis Perilaku KetidakpatuhanWajib Pajak Badan (Studi Empirik Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(3).

- Fishbein, M. leek Ajzen (1975). *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*, 181-202.
- Fitria, D. (2017). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44.
- Fuadi, A, O., & Mangoting, Y. (2013). "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". Universitas Kristen Petra. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Ghozali, I. (2009). *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS"*. Edisi IV. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Edisi IV. BP UNDIP: Semarang
- Hasanah, N., Khafid, M., & Anisykurlillah, I. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Hidayatulloh, H.A. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada KPP Pratama Bandung Cicadas). *Jurnal Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, W. B. dan R. Burton. (2010). *Hukum Pajak Edisi 5*. Salemba Empat, Jakarta.

- Kaunang, P. G., & Pinatik, S. (2016). Tingkat Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Perilaku Ketidakpatuhan Membayar Pajak Perusahaan di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).
- Kreitner, R. and Kinicki, A. (2001). *Organizational behavior*, 5th, New York: Irwing/McGraw-Hill.
- Madden, T. J., Ellen, P. S., & Ajzen, I. (1992). A comparison of the theory of planned behavior and the theory of reasoned action. *Personality and social psychology Bulletin*, 18(1), 3-9.
- Mardiasmo, Prof.Dr. (2009), *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Marjan, Restu Mutmainnah. 2014. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Masruroh, S., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Kemanfaaaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 435-449.
- Mustikasari E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *SNA X*, Makassar.
- Nainggolan, H., & Patimah, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *KRISNA: Kumpulan*

- Riset Akuntansi*, 10(2), 188-195.
- Noermansyah, A. L., & Aslamadin, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidapatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(2), 329-339.
- Retyowati, F. D., & Aris, M. A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar Pada KPP Pratama Sukoharjo*. Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Restu, M. Marjan. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Riswandi, R. (2014). *Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Resmi, S. (2003). Penerapan Manajemen Laba dalam Perpajakan. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha Yogyakarta*.
- Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Santoso, W. (2008). Analisis Risiko Tidak Patuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Penelitian Terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(1), 85-137.
- Sari, M. M. R., & Afriyanti, N. N. (2012). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak

- Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 1-21.
- Sitanggang, M. T. P. (2009). Model hubungan kausal kesadaran wajib pajak badan modernisasi sistem administrasi pajak dan tindakan penegak hukum di bidang perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak. *Tesis*. Fakultas Ekonomi, Program Magister Perencanaan dan Perancangan Publik, Universitas Indonesia.
- Soemitro, Rachmat. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Supramono & Damayanti, Woro Theresia. (2005). *Perpajakan Indonesia, (Mekanisme dan Perhitungan)*. Yogyakarta: Andi.
- Susherdianto, R., & Haryanto, H. (2014). “*Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi WPOP Yang Memiliki Usaha Di Kota Kudus)*”. Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sutanto, H. A., & Rachmansyah, Y. (2016). Determinan Produksi Usaha Kecil Konveksi Kabupaten Batang. *Journal of Economic Education*, 5(2), 214223.
- Syahputri, Y. F., & Rusli, R. (2015) “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan)*”. Doctoral dissertation Riau University.
- Syarahputri, D. (2017). Pengaruh *Theory Of Planned Behavior*, Kewajiban Moral,

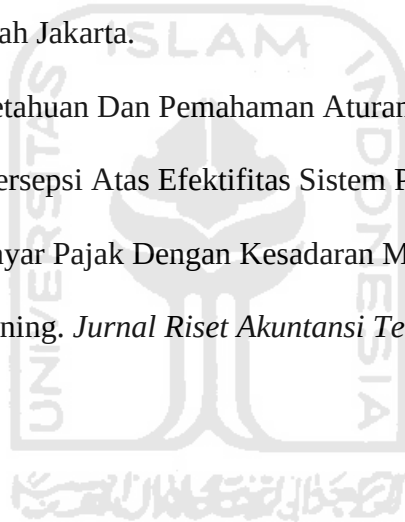
- dan Budaya Pajak Terhadap Niat Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas (Studi Kasus di Wilayah KPP Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Taher, S. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Cakung (studi empiris pada wajib pajak di wilayah kecamatan Cakung), *Skripsi*. S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Utama, P. N. P., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, v. 28, n. 2, p. 1550 – 1579.
- Vaughan, G., & Hogg, M. A. (2005). *Introduction to social psychology*. 4th ed. Frenchs Forest, Sydney, Australia: Pearson Education Australia.
- Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 138.
- Waluyo, 2005, Perpajakan Indonesia, Buku 1-Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Website Pajak. (2019). Usaha Mikro: Klasifikasi, Dasar Hukum dan Kewajiban Perpajakan. Diakses 20 Desember 2019.
<https://www.online-pajak.com/usaha-mikro>.
- Wibiyani, A. C., & Ardiyanto, M. D. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan

Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Notaris di Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*. 8(3).

Winarsih, E. S. (2014). *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukoharjo)”*. Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret.

Zaini, P. A. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zainuddin, Z. (2017). Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2).



Lampiran 1 : Kuisisioner
KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum wr. wb.

Yth, Bapak/ Ibu/ Saudara wajib pajak UMKM konveksi

Penelitian ini mengangkat topik perpajakan, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM bidang konveksi. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan. Data yang saya perlukan merupakan persepsi Bapak/Ibu/Saudara dan bukan *hard copy* yang merupakan rahasia instansi. Data ini akan dianalisis dalam bentuk agregat, bukan dalam bentuk spesifik jawaban Bapak/Ibu/Saudara. Sesuai dengan etika penelitian, peneliti akan menjaga kerahasiaan jawaban responden. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Jurusan Akuntansi.

Judul penelitian saya:

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak
UMKM bidang Konveksi di Kabupaten Tegal**

Yang melakukan penelitian:

Nama : UMI MAHFIYAH

Status : Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu peneliti dalam pengisian kuesioner ini. Terimakasih atas kesediaan waktu yang telah Bapak/Ibu/Saudara luangkan guna pengisian kuesioner penelitian ini.

Peneliti

UMI MAHFIYAH



No	Norma Subyektif	STS	TS	R	S	SS
	Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mungkin Bapak/Ibu/Saudara dipengaruhi oleh orang-orang sekitar, baik pengaruh itu bersifat positif atau negatif, menurut Bapak/Ibu/Saudara, siapa saja yang bisa mempengaruhi keputusan tersebut?					
1	Teman					
2	Pasangan					
3	Anggota Keluarga					
4	Rekan Bisnis					
5	Petugas Pajak					

No	Kontrol Perilaku yang dipersepsikan	STS	TS	R	S	SS
	Bila Bapak/Ibu/Saudara berniat untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Bapak/Ibu/Saudara hal-hal apa yang bisa menghambat atau menghalangi keinginan tersebut?					
1	Kemungkinan diperiksa petugas pajak					
2	Kemungkinan dikenai Sanksi (administrasi dan pidana)					
3	Kemungkinan pelaporan pihak pajak					

No	Pemahaman dan Pengetahuan Pengaturan Perpajakan	STS	TS	R	S	SS
1	Sebagai wajib pajak, saya memahami mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak					
2	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan					

3	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak					
4	Sebagai wajib pajak, saya memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang di lakukan KPP					
5	Sebagai wajib pajak, saya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui pelatihan perpajakan					

Sanksi Perpajakan		STS	TS	R	S	SS
1	Pemerintah akan menjatuhkan sanksi pidana jika saya melanggar aturan pajak yang cukup berat					
2	Pemerintah akan menjatuhkan sanksi administrasi jika saya melanggar aturan pajak yang ringan					
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik Wajib Pajak					
4	Pemerintah akan menjatuhkan hukuman jika menemukan saya tidak melaporkan beberapa atau seluruhnya pendapatan kena pajak					
5	Pemerintah belum serius untuk menjatuhkan hukuman jika administrasi pajak menemukan bahwa Saya tidak melaporkan beberapa pendapatan kena pajak					

No	Ketidakpatuhan Wajib Pajak	STS	TS	R	S	SS
1	Saya tidak pernah melaporkan SPT tepat waktu					
2	Saya mengurangi besarnya pembayaran pajak dari yang seharusnya, karena membayar pajak merugikan pribadi saya					
3	Saya tidak melaporkan kegiatan usaha yang saya miliki kepada Direktorat Jendral Pajak					

Terimakasih

Lampiran 2: Data Hasil Kuisisioner

Responden	Sikap Keperilakuan					Norma Subyektif				
	SK1	SK2	SK3	SK4	SK5	NS1	NS2	NS3	NS4	NS5
1	5	4	4	5	3	5	4	4	5	5
2	4	5	4	4	2	4	3	4	3	5
3	4	5	4	4	3	4	5	3	3	4
4	5	5	5	5	5	4	5	5	3	4
5	5	4	4	4	3	5	4	4	3	3
6	5	5	5	4	4	4	5	3	4	4
7	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2
8	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4
9	2	1	1	3	3	2	3	3	1	1
10	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4
11	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4
12	3	5	5	1	5	4	4	4	4	4
13	4	5	5	5	3	4	5	5	5	4
14	4	5	5	4	4	2	4	4	4	4
15	3	2	3	2	2	5	4	4	2	4
16	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
17	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
18	4	4	4	3	4	2	3	2	3	4
19	3	4	5	2	1	5	2	5	5	5
20	4	4	4	4	3	4	4	3	5	5
21	2	5	4	3	4	4	4	3	4	5
22	4	4	4	2	4	5	5	1	3	4
23	4	4	4	4	4	4	4	3	2	5
24	4	4	5	5	1	5	1	4	2	5
25	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4
26	2	4	4	2	2	4	4	2	4	5
27	4	2	4	2	4	4	4	4	1	4
28	5	2	5	4	4	5	2	4	4	5
29	3	5	5	3	5	4	3	2	3	4
30	5	3	5	5	3	4	1	5	1	5
31	4	5	3	2	4	4	5	4	4	1

32	2	3	3	2	1	2	3	3	1	2
33	3	4	4	2	1	4	3	5	4	4

responden	Sikap berperilaku					Norma Subyektif				
	SK1	SK2	SK3	SK4	SK5	NS1	NS2	NS3	NS4	NS5
34	5	5	4	3	5	5	4	5	5	3
35	3	4	4	1	3	5	4	5	2	3
36	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5
37	4	5	4	5	5	4	2	3	1	5
38	2	5	3	5	1	4	5	3	4	5
39	4	5	5	2	3	4	5	5	3	4
40	4	5	3	4	4	4	3	4	3	4
41	2	4	4	2	2	2	2	2	2	4
42	4	5	4	3	3	5	4	5	4	5
43	3	4	3	5	2	5	4	4	5	5
44	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4
45	5	4	4	5	4	4	5	5	5	4
46	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5
47	5	5	5	3	1	4	5	3	4	4
48	2	3	2	2	3	2	3	3	2	3
49	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3
50	1	2	3	2	2	3	2	3	3	3
51	1	2	3	3	3	1	2	3	4	2
52	3	4	5	4	3	2	3	3	2	3
53	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3
54	2	3	4	3	4	1	2	3	2	3
55	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2
56	5	4	5	3	4	1	2	3	3	4
57	1	2	5	1	3	4	5	4	2	4
58	3	4	4	4	4	4	3	4	3	5
59	4	3	3	2	1	2	3	3	2	3
60	4	5	4	3	4	4	5	5	4	4
61	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2
62	4	2	4	4	2	4	4	2	3	4
63	4	4	4	4	5	5	1	3	2	4
64	1	2	1	1	1	2	2	3	1	5
65	3	3	3	3	3	4	5	3	3	5
66	3	5	4	3	3	5	5	5	5	5

67	3	5	3	3	3	4	4	5	5	4
68	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4
69	2	3	3	4	4	4	4	3	3	3
70	1	1	1	3	3	1	1	2	3	4

Responden	Sikap Keperilakuan					Norma Subyektif				
	SK1	SK2	SK3	SK4	SK5	NS1	NS2	NS3	NS4	NS5
71	4	4	5	2	2	4	5	5	4	4
72	4	5	5	1	1	4	5	5	4	5
73	5	4	5	3	3	4	5	5	4	4
74	4	4	3	5	5	4	4	4	5	5
75	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
76	3	5	4	3	3	4	4	4	4	4
77	3	4	3	4	4	4	5	5	4	4
78	5	4	5	3	3	4	4	4	5	5
79	4	2	2	1	1	3	3	4	4	3
80	3	4	4	1	1	3	4	4	4	5
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	3	4	4	1	1	4	5	4	4	5
83	4	3	4	3	4	1	1	2	1	1
84	2	3	1	5	5	2	1	3	2	3
85	5	5	5	3	3	4	3	4	3	4
86	3	4	4	4	4	4	3	4	5	4
87	3	3	4	5	5	2	3	3	3	2
88	4	2	2	2	2	4	4	3	4	4
89	2	3	3	4	3	4	4	5	4	5
90	2	4	4	2	4	4	4	2	3	3
91	2	2	3	4	2	4	4	3	1	3
92	3	2	2	5	5	4	4	3	5	4
93	1	3	2	4	5	2	2	3	3	1
94	2	3	3	5	5	2	1	3	3	2
95	2	3	1	2	1	2	3	1	2	2

96	1	2	2	3	3	4	5	5	4	4
97	3	2	4	4	3	4	3	3	3	3
98	3	4	4	1	1	4	3	4	4	5
99	3	3	4	3	3	5	5	4	5	4
100	4	3	3	3	2	4	3	4	4	4

Responden	Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan			Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan				
	KP1	KP2	KP3	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5
1	5	5	4	4	4	4	5	1
2	4	4	5	4	4	4	5	5
3	5	5	4	4	5	2	4	4
4	5	5	4	4	5	5	4	4
5	5	4	5	5	4	3	4	3
6	4	5	5	4	5	2	4	4
7	5	4	5	2	1	2	1	2
8	2	1	2	4	5	4	4	4
9	4	5	5	2	3	3	1	1
10	5	5	5	2	4	2	3	4
11	2	4	4	5	5	4	4	3
12	5	4	4	4	3	3	4	4
13	4	5	5	4	5	5	5	4
14	4	4	5	2	4	4	4	4
15	4	4	4	5	3	4	2	4
16	5	4	5	1	4	4	1	5
17	4	2	5	5	5	4	5	5
18	5	4	4	2	2	1	2	4
19	2	5	5	5	2	5	5	5
20	4	5	4	4	4	2	5	5
21	4	4	5	4	4	2	4	5
22	3	5	5	5	5	1	2	4
23	4	5	4	4	4	1	2	5
24	5	5	4	5	1	5	2	5
25	5	4	4	4	5	4	4	4
26	2	4	4	4	4	2	4	5
27	4	3	4	4	4	4	1	4
28	5	4	5	5	2	4	4	5
29	4	4	5	4	2	2	4	4
30	2	5	5	4	1	5	1	5

31	5	2	4	4	5	4	4	1
32	5	5	4	2	2	4	1	2
33	5	5	4	4	2	5	4	4

responden	Kontrol Perilaku yang di persepsikan			Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan				
	KP1	KP2	KP3	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5
34	4	5	4	5	4	5	5	3
35	5	4	2	5	4	5	2	3
36	4	5	5	5	5	5	4	5
37	3	5	5	4	2	4	1	5
38	2	2	4	4	5	4	4	5
39	3	4	4	4	5	5	3	4
40	5	4	5	4	2	4	2	4
41	4	2	4	2	2	2	2	4
42	5	2	1	5	4	5	4	5
43	4	4	4	5	4	4	5	5
44	2	2	1	4	5	5	5	4
45	5	4	5	4	5	2	4	4
46	4	4	4	4	5	5	5	5
47	2	5	4	4	5	3	4	4
48	5	4	4	2	4	4	2	3
49	2	5	5	4	4	4	4	5
50	4	2	4	2	2	4	5	5
51	4	4	5	1	2	4	4	2
52	5	4	4	2	2	4	2	4
53	4	3	1	2	3	2	2	3
54	5	5	5	1	2	4	2	4
55	4	5	5	3	2	4	4	2
56	2	1	1	1	2	4	3	4
57	3	5	4	4	5	4	2	4
58	4	4	3	4	4	4	3	4
59	1	1	1	2	4	4	2	4
60	3	4	5	4	5	5	4	4
61	4	5	5	4	4	2	2	2
62	3	4	2	4	4	2	3	4
63	5	5	4	5	1	4	2	4
64	5	2	5	2	2	4	1	5
65	5	4	1	4	5	4	3	5
66	5	4	4	5	5	5	5	5

67	4	2	5	4	4	4	4	4
68	5	4	4	4	4	4	4	4
69	5	4	4	4	4	4	5	3
70	3	3	4	1	1	2	4	4

Responden	Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan			Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan				
	KP1	KP2	KP3	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5
71	4	4	4	4	5	5	4	4
72	1	1	1	4	5	5	4	5
73	3	4	4	4	5	5	4	4
74	4	4	2	4	4	4	5	5
75	4	4	4	4	4	4	4	4
76	5	4	3	4	4	4	4	4
77	4	4	2	4	5	5	4	4
78	4	4	4	4	4	4	5	5
79	3	5	4	4	3	4	4	3
80	5	5	5	3	4	4	4	5
81	3	5	4	4	4	4	4	4
82	2	2	3	4	5	4	4	5
83	3	2	3	2	1	2	2	1
84	4	3	5	2	1	4	2	4
85	2	4	3	4	4	4	5	4
86	3	5	4	4	5	4	5	4
87	1	4	5	2	4	5	3	2
88	5	3	3	4	4	5	4	4
89	4	5	1	4	4	5	4	5
90	5	4	3	4	4	2	2	4
91	5	5	4	4	4	2	2	4
92	4	5	4	4	4	2	5	4
93	5	5	5	4	4	4	4	3
94	4	4	5	5	5	4	4	5
95	5	4	4	2	4	2	3	2
96	4	4	5	4	5	5	4	4
97	5	4	4	4	4	5	4	4
98	4	3	2	4	4	5	5	5
99	4	3	2	5	5	4	5	4
100	4	4	3	4	3	4	4	4

Responden	Sanksi Perpajakan					Ketidakpatuhan		
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	KWP1	KWP2	KWP3
1	4	5	4	5	4	5	5	5
2	4	4	4	3	3	3	5	5
3	2	4	5	3	5	4	4	3
4	1	3	5	3	3	5	5	3
5	4	5	4	3	2	3	3	5
6	4	3	4	3	3	5	4	5
7	5	4	5	4	5	5	4	3
8	4	4	5	2	4	3	4	3
9	4	4	3	4	4	5	5	5
10	3	3	4	3	5	5	5	5
11	2	2	2	2	3	4	2	5
12	2	3	3	2	3	4	4	4
13	3	2	4	2	1	4	5	5
14	3	4	2	3	4	4	4	5
15	2	2	2	2	4	4	4	4
16	5	5	5	5	5	5	4	4
17	2	4	4	4	5	4	4	5
18	2	4	2	2	4	4	4	5
19	2	4	2	4	3	4	5	5
20	4	3	4	4	4	4	5	4
21	4	2	4	3	4	4	3	5
22	1	2	5	4	1	5	3	5
23	4	4	4	4	5	2	2	2
24	1	1	1	2	5	5	5	4
25	4	5	4	4	4	4	4	3
26	5	2	5	5	5	1	1	1
27	1	2	2	1	4	5	5	5
28	2	3	1	5	3	5	5	4
29	4	5	4	5	5	4	5	5
30	2	4	4	4	5	3	3	5
31	3	4	4	4	4	5	4	3
32	3	4	5	3	5	5	5	4
33	4	3	5	5	4	3	5	4
Responden	Sanksi Perpajakan					Ketidakpatuhan		
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	KWP1	KWP2	KWP3
34	2	3	3	2	2	5	5	5
35	2	2	3	4	4	5	4	2
36	2	1	2	3	2	4	4	5

37	4	5	4	4	4	4	5	5
38	4	3	2	1	3	1	1	1
39	2	3	4	2	4	4	4	4
40	4	3	3	3	3	5	4	4
41	4	5	5	4	5	2	2	2
42	4	4	3	3	5	5	4	4
43	2	4	2	1	1	4	5	2
44	3	2	4	2	2	5	5	5
45	2	4	3	3	3	5	4	5
46	2	2	2	2	3	5	5	4
47	3	3	4	3	4	4	5	5
48	3	4	4	3	3	5	1	4
49	3	4	4	3	2	2	4	4
50	3	2	3	2	2	5	5	5
51	2	2	2	3	2	4	4	4
52	3	4	3	2	3	5	4	5
53	3	2	3	3	4	4	3	3
54	2	3	2	3	3	5	5	3
55	2	3	3	3	3	4	5	5
56	3	2	3	2	3	4	5	4
57	1	2	3	2	1	5	5	5
58	2	1	3	2	3	5	4	4
59	2	2	1	2	2	5	5	5
60	2	3	3	2	3	4	4	4
61	4	4	2	2	4	4	5	3
62	1	2	3	1	3	4	4	3
63	5	5	5	4	5	3	3	3
64	1	2	1	2	2	5	5	3
65	1	1	1	1	4	5	5	5
66	2	2	3	3	4	5	4	4
67	3	3	3	3	3	4	2	5
68	3	3	3	3	3	3	4	4
69	5	4	5	5	3	5	4	4
70	4	2	1	1	1	4	5	5

Responden	Sanksi Perpajakan					Ketidakpatuhan		
	SK1	SK2	SK3	SK4	SK5	KWP1	KWP2	KWP3
71	3	3	4	5	5	4	3	1
72	4	4	5	5	5	2	1	5

73	4	4	4	3	5	3	4	4
74	4	4	5	4	5	4	3	2
75	3	3	3	3	3	3	2	4
76	4	4	4	4	3	5	4	3
77	5	5	3	4	3	3	1	2
78	4	3	3	4	1	4	4	4
79	3	3	3	2	2	4	5	4
80	4	3	3	4	4	4	3	1
81	4	4	4	4	2	3	5	4
82	2	3	2	2	2	5	5	5
83	3	4	3	4	4	4	3	4
84	5	4	5	5	3	3	3	5
85	3	3	2	3	5	3	5	4
86	3	3	4	3	3	3	5	4
87	5	4	5	4	3	2	4	5
88	2	2	2	2	3	5	3	3
89	2	1	1	1	3	4	5	5
90	2	4	4	3	3	5	4	3
91	2	3	2	1	3	4	4	4
92	4	3	4	3	5	3	3	3
93	2	3	2	4	4	1	3	2
94	2	1	2	2	3	4	4	3
95	4	5	5	4	4	1	3	4
96	3	3	4	3	5	4	4	5
97	2	4	3	1	1	5	4	3
98	3	3	2	3	5	3	2	3
99	4	2	3	3	3	3	4	3
100	2	4	2	2	4	3	4	5

Lampiran 3 : Profil Wajib Pajak

Profil	Kriteria	Jumlah (orang)	Presentase
Jenis Kelamin	Pria	59	59%
	Wanita	41	41%
	Total	100	
Usia	<20 Tahun	5	5%
	20 - 30 Tahun	23	23%
	31 - 40 Tahun	32	32%
	41 - 50 Tahun	18	18%
	>50 Tahun	22	22%
	Total	100	100%
Pendidikan	SMA/Sederajat	61	61%
	D3	7	7%
	S1	32	32%
	S2	0	0%
	Total	100	100%
Pendapatan per Tahun	< Rp.500 jt	79	79%
	Rp. 500jt - Rp.1M	18	28%
	Rp. 1M - Rp.4,8M	3	3%
	> Rp. 4,8M	0	0%
	Total	100	100%
Kepemilikan NPWP	Sudah ada	25	25%
	Belum ada	75	75%
	Total	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2020

HASIL OLAH DATA

Lampiran 4 : Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sikap Keperilakuan (SK)

Correlations						
	SK1	SK2	SK3	SK4	SK5	TOTALSK
SK1	1	.539**	.616**	.353**	.260**	.776**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.009	.000
N	100	100	100	100	100	100
SK2	.539**	1	.604**	.222*	.254*	.725**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.027	.011	.000
N	100	100	100	100	100	100
SK3	.616**	.604**	1	.156	.192	.704**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.122	.055	.000
N	100	100	100	100	100	100
SK4	.353**	.222*	.156	1	.534**	.662**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.027	.122		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
SK5	.260**	.254*	.192	.534**	1	.659**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.009	.011	.055	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
TOTALSK	.776**	.725**	.704**	.662**	.659**	1
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).						

Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.779	6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Norma Subyektif (NS)

Correlation s						
	NS1	NS2	NS3	NS4	NS5	TOTALNS
NS1	1	.546**	.515**	.470**	.542**	.812**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
NS2	.546**	1	.409**	.520**	.305**	.753**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.000
N	100	100	100	100	100	100
NS3	.515**	.409**	1	.505**	.390**	.734**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
NS4	.470**	.520**	.505**	1	.416**	.782**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
NS5	.542**	.305**	.390**	.416**	1	.690**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
TOTALNS	.812**	.753**	.734**	.782**	.690**	1
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.794	6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kontrol Perilaku (KP)

Correlations				
	KP1	KP2	KP3	TOTALKP
KP1	1	.292**	.213*	.668**
Pearson Correlation				
Sig. (2-tailed)		.003	.033	.000
N	100	100	100	100
KP2	.292**	1	.471**	.786**
Pearson Correlation				
Sig. (2-tailed)	.003		.000	.000
N	100	100	100	100
KP3	.213*	.471**	1	.771**
Pearson Correlation				
Sig. (2-tailed)	.033	.000		.000
N	100	100	100	100
TOTALKP	.668**	.786**	.771**	1
Pearson Correlation				
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).				

Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

(PP)

Correlations						
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	TOTALPP
PP1	1	.539**	.548**	.552**	.280**	.775**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.005	.000
N	100	100	100	100	100	100
PP2	.539**	1	.518**	.499**	.300**	.754**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.000
N	100	100	100	100	100	100
PP3	.548**	.518**	1	.585**	.311**	.793**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.002	.000
N	100	100	100	100	100	100
PP4	.552**	.499**	.585**	1	.413**	.812**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
PP5	.280**	.300**	.311**	.413**	1	.620**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.005	.002	.002	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
TOTALPP	.775**	.754**	.793**	.812**	.620**	1
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.793	6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Sanksi Perpajakan (SK)

Correlation s						
	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	TOTALSP
SP1	1	.539**	.548**	.552**	.280**	.775**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.005	.000
N	100	100	100	100	100	100
SP2	.539**	1	.518**	.499**	.300**	.754**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.002	.000
N	100	100	100	100	100	100
SP3	.548**	.518**	1	.585**	.311**	.793**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.002	.000
N	100	100	100	100	100	100
SP4	.552**	.499**	.585**	1	.413**	.812**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	100	100	100	100	100	100
SP5	.280**	.300**	.311**	.413**	1	.620**
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.005	.002	.002	.000		.000
N	100	100	100	100	100	100
TOTALSP	.775**	.754**	.793**	.812**	.620**	1
Pearson Correlation						
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.793	6

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Ketidakpatuhan Wajib Pajak (KWP)

Correlations				
	KWP1	KWP2	KWP3	TOTALKWP
KWP1	1	.504**	.292**	
Pearson Correlation				.763**
Sig. (2-tailed)		.000	.003	.000
N	100	100	100	100
KWP2	.504**	1	.411**	
Pearson Correlation				.825**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
N	100	100	100	100
KWP3	.292**	.411**	1	
Pearson Correlation				.738**
Sig. (2-tailed)	.003	.000		.000
N	100	100	100	100
TOTALKWP	.763**	.825**	.738**	
Pearson Correlation				1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Scale: ALL VARIABLES

Reliability Statistics

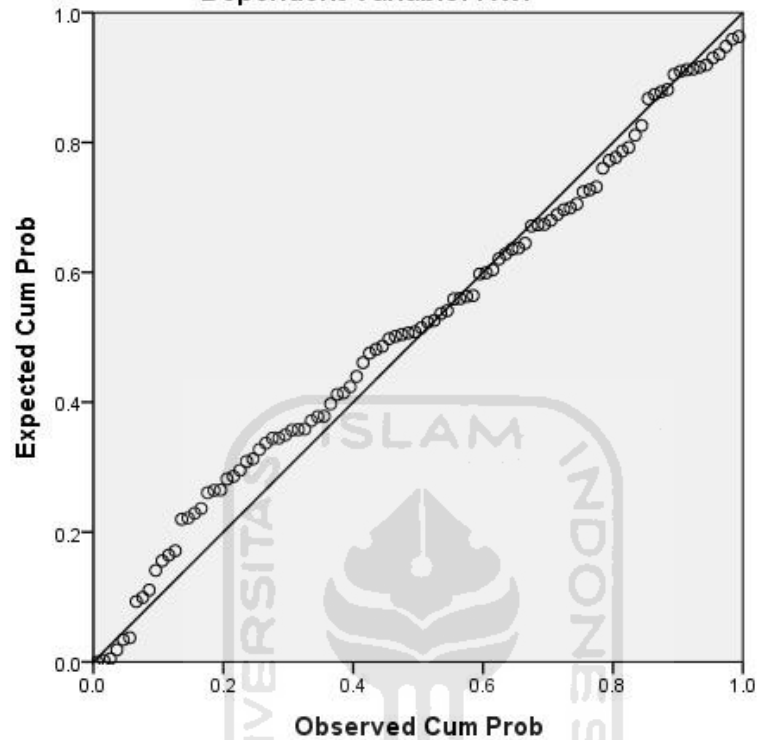
Cronbach's Alpha	N of Items
.815	4

Lampiran 5 : Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas (Analisis Grafik)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KWP



Sumber: Data SPSS diolah, 2020

Hasil Uji Normalitas (Analisis Statistik)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}		11.8200000
	Mean	
	Std. Deviation	1.34718631
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.063
	Negative	-.070
		.070
Test Statistic		
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

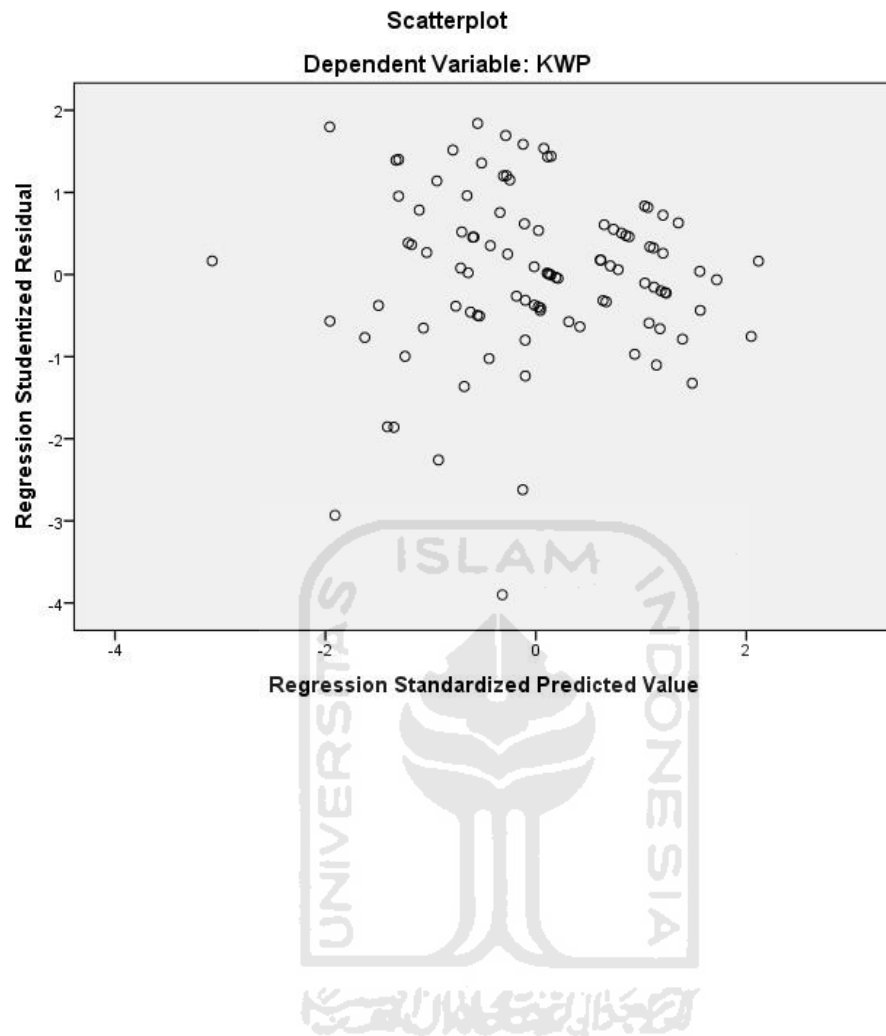
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



Hasil Heteroskedastisitas



Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
(Constant)	15,323	1,906		8,039	,000		
SK	,140	,063	,230	2,215	,029	,703	1,422
NS	,209	,102	,353	2,050	,043	,258	3,883
KP	,140	,089	,140	1,573	,119	,958	1,044
PP	-,349	,112	-,522	-3,121	,002	,273	3,667
SP	-,308	,056	-,518	-5,506	,000	,860	1,163
a. Dependent Variable: KWP							



Lampiran 6 : Uji Hipotesis

Hasil Uji Regresi Berganda

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1					
Regression	179.676	5	35.935		
Residual	453.084	94	4.820	7.455	.000 ^b
Total	632.760	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), SP, NS, KP, SK, PP

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533 ^a	.284	.246	2.195

a. Predictors: (Constant), SP, NS, KP, SK, PP

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	15.323	1.906			.000
(Constant)	.140	.063	.230	8.039	.029
SK		.102	.353	2.215	.043
NS	.209	.089	.140	2.050	.119
KP	.140			1.573	
PP	-.349	.112	-.522	-3.121	.002
SP	-.308	.056	-.518	-5.506	.000

c. Dependent Variable: KWP

